



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI X DPR RI
DENGAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
(BRIN) RI DAN Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) RI**

- Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Selasa, 12 November 2024
Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Gedung Nusantara I Lt. 1 DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Acara : 1. Perkenalan Pejabat BRIN dan BPS beserta jajaran;
2. Gambaran umum arah kebijakan BRIN dan BPS 2024-2029; dan
3. Lain-lain.
- Waktu : Pukul 13.22 WIB s.d. 17.01 WIB
Ketua Rapat : Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P. (Ketua Komisi X DPR RI/F-P. GOLKAR)
Sekretaris Rapat : Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si. (Kepala Bagian Komisi X DPR RI)
- Hadir : **A. PIMPINAN DAN ANGGOTA:**
28 orang Anggota hadir dari 44 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut:

I. PIMPINAN:

1. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P. (Ketua Komisi X/F-P. GOLKAR)
2. My Esti Wijayati (Wakil Ketua Komisi X/F-PDI PERJUANGAN)
3. Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si. (Wakil Ketua Komisi X/F-P.GERINDRA)
4. H. Lalu Hadrian Irfani, S.T. (Wakil Ketua Komisi X/F-PKB)
5. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos. (Wakil Ketua Komisi X/F-PKS)

II. ANGGOTA:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

3 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Once Mekel, S.H.
2. Denny Cagur, S.Pd.
3. Bonnie Triyana, S.S.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
(F-P. GOLKAR)**

5 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M.
2. Ferdiansyah, S.E., M.M.
3. Drs. Juliyatmono, M.M., M.H.
4. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
5. Ashraff Abu

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA (F-P. GERINDRA)**

2 orang Anggota dari 5 Anggota

1. Ali Zamroni, S.Sos., M.A.P.
2. Ruby Chairani Syiffadia, B.A. (Hons),
M.Sc.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
(F-P. NASDEM)**

5 orang Anggota dari 6 Anggota

1. Ratih Megasari Singkaru, M.Sc.
2. Lita Machfud Arifin
3. Prof. Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E.,
S.Kom., M.M.
4. Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, S.P., M.P.
5. Eva Stevany Rataba, S.H.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(F-PKB)**

2 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Habib Syarief Muhammad
2. Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si.

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
(F-PKS)**

2 orang Anggota dari 3 Anggota

1. Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T.
2. Drs. H. Mohd. Iqbal Romzi

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)**

2 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Verrell Bramasta
2. Muhammad Hoerudin Amin, S.Ag., M.H.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
(F-P. DEMOKRAT)**

2 orang Anggota dari 3 Anggota

1. Drs. Sabam Sinaga, M.M.
2. Bramantyo Suwondo, M.IR.

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Kepala BRIN RI beserta jajaran
2. Plt. Kepala BPS beserta jajaran

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X DPR RI):

(rekaman terputus) Statistik, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Kepala BRIN dan BPS beserta seluruh jajaran.

Nampaknya ini *full team* ini, luar biasa. Dan tentunya kepada Pimpinan yang sesungguhnya juga ini kita akan *full team*, tetapi di awal ini kami juga sampaikan, mungkin nanti di tengah-tengah akan ada pembagian tugas karena kami juga harus *defence* di depan terkait dengan Undang-Undang Prolegnas yang diusulkan oleh Komisi X dan tentunya anggota Komisi X yang kami banggakan hadirin sekalian yang berbahagia.

Alhamdulillah kita semua bisa melakukan RDP perdana dengan Kepala BRIN dan Kepala BPS beserta seluruh jajaran dalam keadaan sehat *wal'afiat*. Dan menurut laporan dari sekretariat, saat ini sudah hadir tujuh unsur fraksi dan dengan demikian sudah kuorum sebagaimana ditentukan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, perkenankan kami membuka RDP ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIMULAI PUKUL 13.22 WIB)

Bapak-Ibu, hadirin yang saya hormati,

Agenda RDP kita hari ini tentunya karena perdana, yang paling penting adalah ingin melakukan pengenalan dengan kepala dan juga jajaran pejabat BRIN dan BPS. Dan setelah itu tentunya kami ingin mendapatkan gambaran umum arah kebijakan BRIN dan BPS untuk periode 2024 hingga 2029 yang akan datang.

Dan juga jika ada hal-hal lain yang dirasakan perlu untuk disampaikan ataupun dialami, tentu kami pun memberikan kesempatan pada hari ini. Apakah disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Seperti kita ketahui, kedua badan ini mitra baru bagi Komisi X DPR RI. Walaupun bagi Komisi X sebagian dari kita sudah mengenal Bapak Dr. Laksana Tri Handoko dan juga teman-teman dari BPS Ibu Amalia Adininggar Widyasanti. Ini bukan tokoh yang baru bagi kita, sebagian dari kita, tapi BRIN sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RI dalam melaksanakan atau menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta penemuan dan inovasi, ini termasuk penyelenggaraan ketenaganukliran dan juga keantariksaan yang terintegrasi ini merupakan sesuatu yang bagi kami sangat relevan dan kami pun di Komisi X sesungguhnya terlibat di dalam penyusunan Undang-undang Sisdiknas yang lalu di dalam Pansus. Jadi, ikutlah melahirkan adanya BRIN ini.

BPS sendiri merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Nah, saat ini Ibu Amalia atau saya sering memanggilnya Bu Weni-Bu Weni, beliau adalah pejabat atau Deputi di Bappenas tapi sekarang menjadi Plt. Kepala BPS. Doa kami Bu mudah-mudahan Plt-nya segera hilang ya Bu ya. Jadi nanti lebih enak lagi ini dengan Komisi X bermitranya.

BPS ini tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Statistik adalah memastikan bahwa data yang dihasilkan BPS dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan nasional, perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan evaluasi sektor-sektor strategis di Indonesia. Nah, tentu saja kami Komisi X sangat antusias untuk mendengarkan informasi-informasi penting dan terkini terkait struktur organisasi, program kinerja, anggaran, capaian, dan juga kendala maupun permasalahan yang dihadapi oleh BRIN dan BPS. Dan tentu saja apa tantangan-tantangan yang dihadapi, termasuk kendala-kendala terkait sumber daya manusia, teknologi, dan lain-lainnya.

Termasuk juga BPS, saya mengamati banyak mungkin pemikiran dan terobosan baru yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, merasa perlu jika ada satu undang-undang baru yang merevisi undang-undang yang ada yang mungkin sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, sebagai

informasi kepada teman-teman di periode lalu, sebenarnya Baleg atas inisiatif DPR pernah mengajukan undang-undang statistik ini di dalam prolegnas.

Nah, sebelum Kepala BRIN dan Kepala BPS menyampaikan perkenalan dan juga beberapa pokok hal yang kita tadi ingin dengarkan, kita sepakati dulu kesepakatan waktu kita untuk pertemuan hari ini, sampai jam berapa teman-teman? Jam 15.00 WIB dulu ya. Mudah-mudahan nanti 15 menit, 15 menit, dan kemudian kita bisa tanya jawab lebih banyak.

Tapi tentu saja kepada Kepala BRIN dan Kepala BPS kami juga tentunya bisa nanti memberikan kesempatan merespons jika ada kesempatan cukup panjang ya merespons apa yang nanti disampaikan sebagai tanggapan ataupun pendalaman dari anggota.

Kita sepakati dulu ya jam 15.00 WIB, jika nanti diperlukan bisa kita perpanjang.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, kita beri kesempatan kepada Bapak Dr. Laksana Tri Handoko sebagai Kepala BRIN Republik Indonesia. Pertama mungkin sedikit memperkenalkan dulu timnya yang hadir di sini. Hadir mungkin ada sekretaris utama, wakil kepala, dan juga teman-teman Deputi, dan lain-lain. Dan juga setelah itu baru memaparkan program dan kegiatannya.

Silakan.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Baik, terima kasih.

**Ibu Pimpinan yang kami hormati,
Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati.**

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X DPR RI):

Nah, karena perkenalan ini benar-benar ini harus *fetching channel* lho Pak Handoko.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Karena.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X DPR RI):

Iya-iya oke.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Empat periode kami ikut.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X DPR RI):

Empat periode ya yang bestie.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Mohon maaf.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi X yang kami hormati,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo Budhaya,
Salam Kebajikan.

Mohon izin.

Pertama-tama, sesuai agenda dan permintaan dari Ibu Pimpinan untuk memperkenalkan tim kami. Jadi saya sekali lagi, Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN. Kemudian sebelah saya ini Pak Wakil Kepala BRIN, Bapak Prof. Dr. Amarulla Octavian, ya mohon maaf. Kemudian di sebelahnya Ibu Sekretaris Utama kami, Ibu Nur Tri Aries.

Kemudian sebelahnya lagi itu Bapak Inspektur Utama kami, Bapak Christianus, dan sebelahnya lagi Deputy Kebijakan Pembangunan, Bapak Mego Pinandito. Kemudian sebelahnya lagi Deputy Pemanfaatan Riset dan Inovasi, Bapak Dr. Hendrian, dan di belakang itu ada Deputy Riset dan Inovasi Daerah, itu Bapak Dr. Yopi, dan sebelahnya Bapak Yopi adalah Bapak Dr. Iman Hidayat, ini Deputy Infrastruktur Riset dan Inovasi. Kemudian Ibu Boediastoeti, Deputy Kebijakan Riset dan Inovasi. Kemudian, Deputy Sumber Daya Manusia IPTEK, Bapak Prof. Dr. Edy Giri. Kemudian, Deputy Fasilitas Riset dan Inovasi Bapak Prof. Dr. Agus Haryono.

Jadi, mungkin demikian Ibu yang...

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X DPR RI):

Tujuh ya Pak deputinya?

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Iya tujuh, ditambah ya, Waka, Irtama, dan Sestama.

Ya, mohon izin untuk melanjutkan apa, perkenalan, paparan kami.

Jadi pertama, kami ingin memperkenalkan terkait BRIN.

Jadi BRIN itu dibentuk mengemban amanat dari 4 undang-undang, Bapak dan Ibu. Yang pertama, yaitu Undang-Undang 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagai badan pelaksana di dalam undang-undang tersebut, kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 sebagai Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kedirgantaraan, kedirgantaraan itu artinya antariksa dan juga penerbangan, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, itu sebagai badan riset dan inovasi nasional. Jadi, sekaligus kami mengucapkan apresiasi kepada Bapak Ibu Komisi X yang pada periode sebelumnya telah mendukung penyusunan Undang-undang 11 tahun 2019 ini, kemudian Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lanjut.

Jadi, BRIN dibentuk pada 28 April tahun 2021 dan dengan tujuan utama sebenarnya untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi dengan tujuan untuk meningkatkan, melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi periset untuk melakukan riset dan inovasi diharapkan dapat menjadi basis dari ekonomi berbasis pengetahuan untuk Indonesia ke depannya. Jadi, lanjut.

Mengapa BRIN itu harus dibentuk? Pada saat itu, selain memang merupakan amanat undang-undang, jadi kalau kita melihat komponen pembentuk dari aktivitas riset dan inovasi itu ada tiga yang pertama itu adalah SDM unggul. Jadi SDM yang unggul, kemudian infrastruktur, dan anggaran. Nah, *problem*-nya sebelum pembentukan BRIN, kalau di total itu semuanya besar. Anggarannya besar, SDM-nya besar, infrastruktur cukup besar, tetapi semuanya selalu merasakan kekurangan.

Jadi, itu sudah fenomena sebelumnya baik pada saat saya masih Kepala LIPI pada saat itu. Jadi itulah yang waktu itu disebut sebagai fenomena diecer-ecer, karena semua di terlalu banyak tempat, sehingga *critical mass*-nya sangat rendah. Nah, itulah yang kemudian pada saat itu Presiden Jokowi memutuskan untuk mengkonsolidasikan seluruh sumber daya riset dan inovasi, baik itu SDM terutama SDM dan infrastruktur ke dalam BRIN. Lanjut.

Nah, kami pada prinsipnya telah menyelesaikan integrasi itu pada tahun kedua, lebih tepatnya pada akhir tahun 2022 yang melibatkan lima institusi besar pada saat itu ada Kementerian Riset dan Teknologi serta 4 LPMK besar lainnya terkait riset dan inovasi, selain juga balitbang-balitbang kementerian dengan total jumlah seperti yang ditampilkan di layar. Dari 924 katakanlah posisi struktural itu menjadi 153, sekaligus mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan 14.000 ASN dan Rp85 triliun aset sehingga saat ini BRIN menjadi salah satu KL signifikan untuk laporan keuangan pemerintah. Lanjut.

Nah, tadi seperti yang sudah saya perkenalkan. Jadi, ini adalah struktur dari kami di BRIN pada saat ini. Jadi, kami bertanggung jawab kepada Presiden dengan mendapatkan arahan dari Dewan Pengarah dengan struktur yang berisi ada Wakil Kepala BRIN, Inspektorat Utama, Sekretariat Utama, tujuh Deputy yang sifatnya adalah jabatan struktural dan 12 organisasi riset yang sifatnya ada jabatan fungsional. Jadi itu seperti jabatan Rektor kalau di perguruan tinggi. Kemudian, lanjut.

Ya, mengapa bentuk organisasi BRIN seperti sebagaimana kami Tampilkan sebelumnya? Karena BRIN memiliki tiga fungsi secara umum. Yang pertama karena kami awalnya mengkonsolidasikan balitbang-balitbang kementerian yang notabene tugas dan fungsinya adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan di sektor terkait, maka tugas itu yang kemudian dialihkan ke BRIN. Sehingga kami harus memberikan layanan kembali sebagai pendukung kebijakan untuk seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia. Jadi tiga Deputy yang berwarna biru itu yang memiliki fungsi tersebut.

Kemudian, untuk fungsi kami sebagai lembaga riset yang melaksanakan riset di berbagai bidang itu dilaksanakan oleh organisasi riset tadi yang 12 organisasi riset dengan saat ini total ada 87 pusat riset. Kemudian, sebagai fungsi untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi itu di amanatkan kepada empat Deputy kami, Deputy Sumber Daya Manusia Iptek, Deputy Fasilitasi, Deputy Infrastruktur, dan Deputy Pemanfaatan sehingga dengan demikian dari tugas dan fungsi kami jelas, bahwa BRIN tidak hanya ditujukan untuk periset BRIN. Jadi, periset BRIN itu adalah sebagian dari komunitas IPTEK komunitas periset yang harus difasilitasi oleh BRIN. Jadi, kami bertanggung jawab untuk memfasilitasi seluruh komunitas riset dan inovasi nasional baik dari kampus, dari BRIN sendiri, lembaga riset yang lain termasuk swasta, dan juga industri.

Jadi, perlu kami sampaikan bahwa lembaga riset di berbagai negara itu harus ada banyak, tetapi lembaga riset yang banyak itu harusnya adalah lembaga riset swasta atau lebih tepatnya industri. Itu yang akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Sedangkan lembaga riset pemerintah itu sifatnya itu pasti hanya satu atau dua dan harus menjadi *enabler* atau fasilitator bagi tumbuhnya RnD-RnD industri di berbagai sektor tersebut. Jadi, itulah yang menjadi tujuan dan tugas utama kami. Lanjut.

Nah, sebagai pendukung kebijakan, jadi untuk sektor riset dan inovasi sendiri dapat kami sampaikan bahwa sebenarnya Indonesia telah memiliki instrumen legal untuk mendukung riset inovasi yang cukup lengkap, kalau tidak bisa dikatakan sudah lengkap. Jadi, ini kalau kami bandingkan dengan berbagai negara yang lain. Jadi, hampir semua sudah ada Bapak dan Ibu, baik itu insentif untuk pelaku riset, insentif untuk pelaku usaha dalam bentuk *tax reduction*, tata kelola dana abadi penelitian, dana abadi riset, dan seterusnya termasuk manajemen talenta nasional yang baru keluar perpresnya. Lanjut.

Mohon izin untuk melanjutkan. Sebagai fasilitator ekosistem riset dan inovasi nasional, apa yang telah kami lakukan selama ini? Jadi, tadi seperti telah kami sampaikan bahwa ada tiga komponen SDM unggul, infrastruktur, dan anggaran. Nah, untuk SDM unggul, karena SDM ini komponen terbesar

dari aktivitas riset dan inovasi, itu kami mendapatkan amanat sekaligus untuk menjalankan manajemen talenta nasional bidang riset dan inovasi yang sudah keluar perpresnya baru-baru ini, Perpres 108 Tahun 2024.

Tetapi program ini sudah kami di mulai sejak BRIN berdiri khususnya sejak awal 2022. Ini untuk memastikan bahwa negara hadir untuk memberikan opsi pada generasi muda kita yang memiliki *passion*, memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu selepas dia *fresh* S1 itu dia bisa langsung lanjut ke S2, langsung lanjut ke S3 yang berbasis riset.

Jadi, ini salah satu perbedaan misalnya nanti dengan PMDSU yang selama ini ada di Kemendikbud atau saat ini ada di Kemendiktisaintek. Kalau PMDSU basisnya adalah pendidikan dan pedagogik. Jadi itu sebabnya mereka ditanya syarat IPK, syarat status prodi dan seterusnya. Tapi kalau yang di BRIN itu adalah jalur aktivitas riset dan inovasi yang tidak mempertanyakan IPK dan status prodi, tetapi hanya mempertanyakan keinginan, *passion* untuk melakukan riset.

Jadi, ini adalah *best practices* dari berbagai negara yang lain, di mana kita selalu memberikan opsi tidak *single* kanal tetapi selalu multikanal untuk memastikan bahwa generasi muda kita, baik yang IPK-nya bagus maupun yang belum bagus tapi memiliki semangat yang kuat dia bisa melanjutkan, katakanlah melakukan sesuatu sesuai *passion*-nya dibidangnya tertentu dan ini untuk memastikan bahwa negara kita akan mampu memberikan opsi adik-adik kita bisa menjadi Doktor sebelum usia 27.

Jadi, itu seperti PMDSU, tetapi ini yang basisnya adalah riset murni, sehingga secara pembiayaan juga menjadi sangat rendah karena risetnya di *embedded* di pusat-pusat riset kami yang ada di BRIN yang secara otomatis akan terbiayai tanpa perlu ada program khusus di bawah bimbingan periset kami dan juga periset dari PTN-BH yang ber-*partner*, bermitra dengan kami. Jadi, ini adalah salah satu bentuk kolaborasi juga dengan perguruan tinggi khususnya PTN-BH. Dan juga kami memastikan bahwa adik-adik kita yang sudah S3, baik lulus dari dalam negeri maupun luar negeri, itu kalau dia memiliki opsi untuk bekerja dan kembali ke Indonesia segera setelah dia lulus tanpa ada jeda. Itu adalah program *post doctoral* yang *pasca doctoral*.

Jadi, kalau dia ingin masuk ASN tentu boleh tapi ASN selalu ada waktu dan sebagainya. Karena kalau tidak, pengalaman kami selama ini anak-anak ini berpotensi untuk pindah ke sektor yang lain karena dia keburu harus mencari makan dan sebagainya. Jadi, kalau sudah begitu kita akan *opportunity lost* terkait generasi muda yang mestinya bisa menjadi jadi generasi unggul untuk periset masa depan.

Dan sebagai titik akhirnya, BRIN sebagai bagian dari manajemen talenta nasional, kami membuka 500 posisi ASN setiap tahun untuk generasi muda berkualifikasi S3, termasuk diaspora. Sehingga ini sebagai *political will* pada saat itu Bapak Presiden dan negara ini bahwa negara ini memberikan opsi bagi generasi muda untuk kembali dan pulang ke tanah air dan memiliki pekerjaan dan dia bisa melanjutkan *passion*-nya sesuai bidang kepakarannya di BRIN

yang infrastrukturnya sudah relatif sangat maju dengan gaji *take home pay* yang kurang lebih itu serupa dengan di Malaysia. Jadi, sehingga tidak ada alasan apakah mereka akan kembali atau tidak tentu dikembalikan kepada mereka, tetapi mereka, tapi negara ini harus hadir bahwa mereka punya pilihan untuk kembali. Lanjut.

Kemudian, untuk masalah anggaran, terkait dengan anggaran riset. Jadi, di BRIN kami mengelola anggaran riset yang bersumber dari APBN sebagian kecil dari APBN dan sebagian besar dari imbal hasil dana abadi penelitian yang dikelola oleh LPDP. Jadi sesuai dengan Perpres 111 2022, LPDP itu memang sudah tidak diperkenankan sebenarnya untuk mengelola layanan program. LPDP murni sebagai *fund manager*, sedangkan untuk layanan program riset itu yang sudah dikelola sepenuhnya oleh BRIN. Kalau untuk beasiswa sampai saat ini itu masih sebagian ada di LPDP dan sebagian masih ada di waktu itu Kemendikbud, mungkin saat ini di Kemendikti dan juga di Kemenag, dan sebagainya.

Perbedaannya, jadi pada saat itu pun sebenarnya kami mengelola dana BOPTN Bapak-Ibu, dana hibah riset yang BOPTN. Tetapi sejak awal pada saat pembentukan BRIN, karena dana BOPTN itu ada yang bersifat afirmatif, itu yang langsung pada saat itu kami serahkan ke Dirjen Dikti ke Kemendikbud sampai sekarang. Jadi, karena yang dikelola di BRIN itu sepenuhnya harus berbasis kompetisi, jadi tidak ada afirmasi. Jadi, ini untuk memastikan bahwa aktivitas riset dan inovasi yang di-*support* didukung oleh BRIN itu memang berbasis kompetisi murni karena kompetisi itu basis paling *basic* dari riset, itu yang harus kami jaga sampai saat ini. Lanjut.

Kemudian, terkait dengan infrastruktur yang ketiga. Jadi, selama ini sebenarnya riset itu biayanya rendah. Jadi kebutuhan untuk riset itu sebenarnya rendah kalau kita hanya melihat biaya bahan. Yang mahal itu selalu infrastruktur, termasuk untuk ilmu sosial. Kalau ilmu sosial biasanya infrastrukturnya itu data yang besar. Nah, biaya untuk memperoleh data baik survei dan sebagainya itu yang mahal. Itu sebabnya sejak awal di BRIN kami melakukan kebijakan utamanya adalah melakukan sentralisasi infrastruktur riset. Sehingga infrastruktur riset itu bisa dikelola secara terpusat tidak hanya dari investasi awalnya, pengadaan awal, tapi juga pemeliharaan dan operasionalnya itu sepenuhnya kami yang menanggung, sehingga periset itu tidak perlu dibebani dengan hal seperti itu.

Jadi, sebenarnya diperlukan periset itu bukan infrastruktur, tetapi akses ke infrastruktur. Jadi, itulah yang sekarang kami jamin. jadi kalau perlu memang harus ada yang ngantri, tetapi ini untuk memastikan bahwa periset tidak dibebani dengan infrastruktur yang besar tersebut.

Yang kedua, ini untuk menjamin utilisasi pemanfaatan dari setiap infrastruktur bisa optimal. Karena infrastruktur riset itu selalu ada absolut ada *lifetime*-nya meskipun dia tidak rusak itu kalau 10 tahun mungkin sudah tidak bisa dipakai. Jadi, karena sudah tidak sesuai misalnya. Nah, sehingga selama masa...

Oh sudah? Mohon izin untuk melanjutkan.

Sehingga selama masa pakainya kami harus memastikan bahwa infrastruktur itu dipakai secara optimal, kalau perlu 24 jam. Jadi, itu yang sekarang kami lakukan dan infrastruktur ini tidak hanya dibuka untuk periset, baik dari kampus maupun periset BRIN dan sebagainya, tetapi juga oleh industri. Jadi, RnD industri. Lanjut.

Ini salah satu contoh dengan tiga skema yang tadi saya sampaikan, skema besar yang kami sampaikan tadi, itu sebenarnya sekaligus memastikan bahwa para periset ini kolaboratif, tidak mengenal institusinya, bisa dilakukan lintas institusi. Ini salah satu contoh adalah skema pusat kolaborasi riset yang di harus di *host* oleh kampus mitra. Jadi, ini kampus mitra harus fokus ke bidang topik tertentu, kemudian mereka harus bekerja sama dengan salah satu pusat riset kami. Nah, ini yang menimbulkan dampak yang luar biasa. Saat ini sudah ada 25 pusat kolaborasi riset di berbagai kampus, kemudian dan ini juga dimungkinkan pusat kolaborasi riset dengan industri, dan juga dengan mitra internasional. Lanjut.

Mohon izin untuk melanjutkan terkait laporan ringkas terkait karena kami adalah pendatang baru di Komisi X. Jadi, mohon izin untuk menyampaikan secara ringkas pelaksanaan anggaran dan penetapan kinerja kami sejak berdiri di tahun 2021 sampai 2024. Jadi, lanjut.

Jadi, secara umum kami, yang kami integrasikan itu sebenarnya ada anggaran dari lima entitas saja. Jadi, kalau yang dari balitbang kementerian itu *basically* kami hanya mengintegrasikan SDM. Kemudian, itu yang mulai tahun 2022 itu PA-nya, bagan pagu anggarannya itu yang sudah berpindah menjadi BRIN sampai dengan saat ini. Lanjut.

Nah, dalam periode sebelum ini kami diminta fokus untuk, Bu Weni pasti tahu, karena Bappenas ini jadi kami diminta fokus untuk prioritas nasional ketiga dan keenam, pada saat itu.

Kemudian, di halaman berikutnya kami sampaikan tabel ringkas terkait capaian dari perjanjian kinerja di tahun 2022 dan tahun 2023. Lanjut. Terus.

Kemudian, capaian-capaian yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya mewakili, merepresentasikan capaian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, baik itu terkait dengan jumlah *output*, katakanlah publikasi di jurnal bereputasi global maupun *outcome* dalam bentuk lisensi kerja sama dengan industri. Termasuk juga karena kami memiliki Politeknik Nuklir Indonesia yang ada di Jogjakarta, juga pemanfaatan hasil riset dan inovasi kepada masyarakat yang ini mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa ini yang selalu kami laksanakan bersama-sama dengan mitra dari komisi.

Kemudian ada SKKNI, kemudian juga ada terkait edu wisata, karena kami mengelola berbagai Kebun Raya di seluruh Indonesia. Kemudian e-layanan sains jadi infrastruktur yang terbuka tadi karena itu dibuka untuk bisa

dipakai semuanya, semuanya dikelola secara daring dengan tajuk e-layanan sains yang sudah mencakup hampir 160.000 layanan dalam 3 tahun terakhir. Dan juga koleksi nasional yang kami hasilkan baik itu berupa flora, fauna, bebatuan, mikroorganisme, arkeologi karena itu diintegrasikan ke kami di BRIN itu sebanyak 18,5 juta koleksi. Lanjut.

Juga kami menerima magang riset dari adik-adik mahasiswa dari berbagai kampus yang sebagian besar di antaranya. Kemudian, kami arahkan untuk melakukan tugas akhir bersama-sama dengan para periset kami dengan *join supervision* bersama para profesor di perguruan tingginya. Dan kemudian mereka didorong untuk melanjutkan ke S2 dan ke S3 melalui melalui program *degree by riset*. Jadi, *degree by riset* ini program yang hanya bisa dilakukan di PTN-BH sesuai regulasi saat ini.

Jadi, kami sudah bekerja sama dengan hampir semua PTN-BH yang sudah disetujui juga ada *post doctoral* tadi yang saya sampaikan untuk khususnya biasanya ini untuk menampung teman, adik-adik yang baru lulus S3 supaya dia bisa begitu lulus langsung bisa bekerja dan tanpa harus masuk ke ASN dan sebagainya. Kemudian juga apresiasi talenta riset inovasi seperti yang kemarin kami selenggarakan yang, BP *prize*. Kemudian, lanjut.

Nah, tadi seperti kami sampaikan bahwa kami juga harus mengembalikan layanan kepada kementerian dan lembaga dalam bentuk rekomendasi kebijakan tidak hanya untuk K/L tapi juga untuk pemda. Jadi, karena kami menaungi BRIDA-BRIDA di daerah, jadi saat ini ada BRIDA yang sudah terbentuk di 21 provinsi dan 134 kabupaten/kota dan diharapkan tahun ini akan bisa terbentuk di seluruh pemerintah daerah.

Kami juga sesuai dengan undang-undang, amanat Undang-Undang Keantariksaan, kami juga melanjutkan layanan data citra baik untuk kementerian/lembaga, industri, maupun pemerintah daerah. Lanjut.

Nah, sebagai resume dari capaian di sampai dengan 2024 ini, jadi syukur *alhamdulillah* Indonesia pada saat ini bisa masuk ke ranking 54 untuk di *Global Innovation Indeks*, di mana sebagian besar itu memang ranking yang terkait dengan riset dan inovasi, dengan skema-skema yang tadinya memang belum ada di negara ini. Jadi, sebagai contoh Indonesia sebelum ada BRIN itu tidak mengenal adanya *funding agency*, misalnya. Jadi dengan adanya BRIN itu Indonesia sudah dianggap memiliki *funding agency* yang mampu memberikan fasilitasi pelaksanaan riset di berbagai sektor. Diharapkan tahun depan bisa masuk ke peringkat 40. Lanjut.

Mohon izin untuk melanjutkan yang bagian yang terakhir, terkait dengan gambaran umum arah kebijakan untuk tahun anggaran 2025, periode 2025 sampai 2029. Lanjut.

Jadi, sesuai dengan dengan rancangan penugasan kinerja yang telah dimasukkan dalam rancangan awal RPJMN 2025-2029. BRIN diamanatkan dengan beberapa indikator, sebagaimana ada di tayangan, dengan target di 2025 dan target diakhir periode di 2029. Jadi, yang beberapa yang penting

adalah termasuk di sini misalnya peringkat *Global Innovation Indeks* yang di menjadi tanggung jawab kami supaya Indonesia bisa masuk ke peringkat 49.

Kemudian pengeluaran belanja IPTEK oleh belanja litbang nasional oleh swasta. Jadi, tadi seperti yang telah kami sampaikan, tugas utama dan indikator utama BRIN sebenarnya bagaimana menciptakan RnD di industri. Jadi, bukan memperbesar BRIN, tapi BRIN menjadi *enabler* fasilitator supaya area di industri itu tumbuh dan itu akan tercermin dalam bentuk belanja litbang yang berasal dari non-pemerintah yang seharusnya rasionya adalah 80% dari total. Kalau di akhir periode 2029 itu kalau tidak salah target belanja litbang nasional itu adalah 1%, sehingga minimal 0,8% itu harus dari swasta, sedangkan APBN itu hanya 0,2%. Lanjut.

Kemudian, sesuai dengan rancangan awal RPJMN periode ini visi, misi, dan tujuan kami sekaligus sasaran strategis yang telah dimasukkan ke Bappenas itu adalah sebagaimana tercantum di layar. Di mana yang bagian yang tebal itu adalah persis sama sesuai dengan indikator kinerja yang dimintakan tadi untuk melaksanakan 8 Asta Cita dan 17 program prioritas dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Khususnya. Lanjut.

Untuk dalam bentuk program, kami mendapatkan amanat untuk fokus secara langsung. Jadi, kami bisa mendukung di beberapa prioritas nasional tetapi ada beberapa yang terkait dengan kami, yaitu prioritas nasional (PN)02 yang terkait dengan swasembada pangan. Itu kami akan fokus ke pengembangan varietas presisi yang sesuai dengan *agroclimate* dan *agroecology* karena Indonesia itu memiliki wilayah yang luas dengan berbagai karakteristik ekologi dan iklim yang berbeda. Sehingga untuk meningkatkan produktivitas pertanian itu harus ada varietas yang presisi untuk setiap lokasi tersebut yang *basically* ini adalah berbasis pada pendekatan genetik.

Kemudian, teknologi budidaya baik untuk pertanian, peternakan, maupun perikanan dan *off farm* yaitu pasca panennya termasuk untuk diversifikasi produk hasil pangan. Kemudian, untuk swasembada energi itu fokus kami ada di transisi PLTU batu bara menjadi lebih ramah lingkungan dan persiapan untuk PLTN.

Kemudian, lanjut untuk prioritas nasional yang ketiga. Kami juga mendapatkan amanat, khususnya terkait dengan infrastruktur berkelanjutan, itu khususnya infrastruktur yang terkait dengan penguatan riset dan inovasi nasional. Jadi, baik yang terkait dengan sumber daya lokal, termasuk aset *store* misalnya untuk *game* yang berasal dari arkeologi, berasal dari tumbuhan, flora, koleksi flora dan faun, dan sebagainya, dan saat ini sudah kami lakukan sedang kami lakukan. Kemudian juga untuk ekonomi digital dan repositori ilmiah nasional yang akan menjadi basis dari data, khususnya berbasis sumber daya genetik untuk ekonomi nasional ke depannya.

Kemudian, untuk infrastruktur berkelanjutan itu kami diminta membantu untuk digitalisasi, ya termasuk SPBE di lintas sektor di pemerintahan. Lanjut.

Untuk prioritas nasional nomor 4, untuk kesehatan. Nah, kami fokus pada penguatan kesehatan preventif. Jadi, kesehatan preventif baik itu dalam bentuk alat kesehatan seperti *rapid test kit*, kemudian juga kedokteran yang sifatnya presisi berbasis genomik, kemudian juga obat dan bahan baku obat yang berbasis pada sumber daya lokal dan pangan fungsional misalnya untuk *stunting*. Kemudian, untuk TBC itu kami saat ini mengembangkan *rapid test kit* dan vaksin TBC. Lanjut.

Nah, sebenarnya yang langsung terkait dengan BRIN yang telah diamanatkan itu adalah PN 04. Jadi, ini persis mestinya bersama-sama dengan Kemendiktisaintek. Kalau PN 04 itu semuanya terkait dengan kami. Kemudian, lanjut.

Untuk prioritas nasional 05 itu kami diminta membantu untuk hilirisasi dan industrialisasi, khususnya yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam lokal yang terbarukan. Artinya hilirisasi dari pertanian, peternakan, kehutanan, dan sebagainya.

Kemudian, fasilitasi industri maju. Jadi, fasilitasi farmasi misalnya, karena kawasan-kawasan sains dan teknologi BRIN telah memiliki fasilitas yang sangat lengkap misalnya untuk memproduksi vaksin sampai mengujinya. Jadi, termasuk untuk fasilitas BSL3 yang dulu waktu zaman covid kita tidak pernah memiliki, sehingga pada saat itu kami kesulitan untuk mengembangkan vaksin.

Kemudian, juga ekonomi berbasis karbon. Sedangkan untuk ekonomi domestik dan global kami diminta untuk membantu fasilitasi UMKM khususnya yang berbasis hasil riset. Bagaimana memperkuat *startup* dan UMKM yang memang membutuhkan sentuhan teknologi.

Oh, ya sudah.

Jadi, kami bekerja sama dengan Kementerian UMKM. Lanjut.

Ini mohon izin ini terakhir, saya pikir. Ini untuk yang tahun anggaran 2025 yang telah diputuskan di Komisi VII sebelumnya. Jadi, saya kira ini perlu penting untuk kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, kalau bicara kerangka pendanaan, jadi kerangka pendanaan untuk tahun anggaran 2025 sampai 2029 yang telah masuk di Bappenas itu sebagaimana terlampir di paparan. Jadi, ini sekaligus sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mencapai belanja litbang nasional sebesar 1% dari PDB.

Kemudian untuk tahun, khususnya untuk tahun anggaran 2025 kami mendapatkan alokasi sebesar 5,84, lanjut ya, 5,842T dengan perincian. Lanjut.

Yang terdistribusi untuk program riset dan inovasi sebesar 2T dan untuk dukungan manajemen sebesar 3,8T, di mana sebagian besar sebenarnya untuk gaji dan operasional belanja pegawai. Jadi, perlu kami sampaikan bahwa kalau lembaga riset dan inovasi di mana pun itu selalu belanja pegawai itu paling besar, karena modal utama kami itu adalah SDM unggul. Jadi apalagi di

BRIN, pegawai BRIN itu umumnya jenjang fungsionalnya sudah tinggi-tinggi, jadi jenjang ahli utama-ahli utama yang tentu belanja pegawainya cukup besar. Dan itu yang dapat menjamin bahwa kami negara ini mampu menarik diaspora katakanlah supaya mereka memiliki opsi dan tidak ada alasan untuk tidak kembali ke negara kita dan bekerja di Indonesia.

Kemudian, ini sedikit terkait prioritas yang PN 04, jadi ini target dan beberapa program prioritas yang dapat kami sampaikan untuk PN 04. Lanjut.

Kemudian, semuanya PN 04 untuk tahun ini. Jadi karena tadi seperti saya sampaikan kami bertanggung jawab langsung untuk, hanya untuk prioritas nasional 04, meskipun kami diminta untuk tetap mendukung prioritas nasional yang 02 maupun 05 dan seterusnya.

Jadi, mungkin demikian Bapak Ibu Pimpinan dan anggota Komisi X yang kami hormati, yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon masukan arahnya untuk memperbaiki dan menjadikan kami lebih baik ke depan.

Terima kasih. Saya kembalikan.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X DPR RI):

Baik. Sampai terkesima ini membaca. Banyak sekali ya ternyata kegiatan-kegiatan yang juga nampak sangat erat kaitannya dengan mitra-mitra lain di Komisi X, termasuk PN 04, sumber daya manusia dan juga prestasi olahraga, kesetaraan gender, pemuda, penyandang disabilitas, dan lain-lain.

Oke. Nanti kita lanjut dalam pendalaman. Sekarang kita beri kesempatan kepada Kepala BPS, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, untuk menyampaikan paparannya.

Silakan, Bu.

KEPALA BPS (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Terima kasih, Bu.

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI.

Yang terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi X.

Yang saya hormati Ibu Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi X.

Yang saya hormati Bapak Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X, serta Bapak-Ibu Anggota Komisi X yang kami hormati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Bapak-Ibu Pimpinan dan anggota Komisi X yang saya hormati,

Kami adalah pendatang baru di Komisi X. Semoga kami dapat diterima dengan baik di rumah baru ini, Bu. Dan tentunya kami BPS beserta jajaran kami, siap untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Bapak-Ibu semua di Komisi X.

Pertama-tama, Ibu ketua dan Bapak-Ibu yang saya hormati, mungkin saya akan memperkenalkan jajaran pimpinan dari BPS.

Di slide 5, mohon slide 5.

Jadi, sebelah saya adalah Sekretaris Utama BPS, Bapak Dr. Eng. Imam Machdi. Kemudian sebelahnya beliau adalah Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Bapak Muhammad Edy Mahmud M.P.

Ya, silakan berdiri Pak, biar kelihatan sampai ujung sana.

Berikutnya adalah Ibu Dr. Pudji Ismartini, beliau Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa sekaligus sebagai pelaksana tugas dari Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Kemudian berikutnya adalah Bapak Dr. Ateng Hartono, Deputy Bidang Statistik Sosial. Jadi ini yang menghasilkan angka kemiskinan, gini rasio ada di sini, Bapak Ibu.

Lalu, berikutnya adalah Deputy Bidang Statistik Produksi, Bapak M. Habibullah, M.Si.

Ini yang menghasilkan statistik sektoral Bu, seperti industri, kemudian juga ada sensus pertanian dan sebagainya macam-macam ada di sini. Lalu, *last but not least* Bu, ini Inspektur Utama Bapak Dr. Dadang Hardiwan. Jadi, kami hadir *full team* untuk pada kesempatan rapat pada hari ini.

Selanjutnya, Bapak-Ibu Komisi X yang saya hormati. Kami ingin menyampaikan bahwa di slide 3, struktur organisasi BPS itu tidak hanya di pusat tetapi ada di daerah. Ini struktur kami yang ada di BPS pusat. Ada sekitar 5 Deputy, 1 Sekretariat Utama, dan 1 Inspektorat Utama dengan Eselon II di bawahnya Bapak dan Ibu. Namun demikian, karena BPS ini adalah instansi vertikal, sehingga *next slide*.

Kami juga punya kantor dan Kepala BPS di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota. Jadi, kalau kepala BPS provinsi ini adalah pejabat setingkat Eselon III. Kami memiliki di 34 provinsi saat ini karena yang daerah pemekaran masih dirangkap oleh beberapa Kepala Provinsi, Bapak Ibu. Kemudian, untuk BPS kabupaten, Kepala BPS kabupaten/kota adalah setingkat Eselon III.

Kemudian, kondisi kepegawaian saat ini Bapak Ibu, kami memiliki 17.349 pegawai yang tersebar di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Karena jumlah kabupaten/kotanya banyak, maka ada 12.887 pegawai BPS yang di tingkat kabupaten/kota, dengan 528 satuan kerja definitif. Jadi, satker kami di tingkat pusat hanya ada tiga, kemudian di tingkat provinsi ada 34 satker, dan ada 491 satker di tingkat kabupaten/kota.

Bapak Ibu yang saya hormati,

Di slide dua, ini adalah selayang pandang mengenai Badan Pusat Statistik, di mana BPS adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tentunya, visi dari lembaga dari BPS adalah kami harus menjadi lembaga penyedia data statistik yang independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data. Sehingga Bapak dan Ibu data-data statistik yang kami hasilkan itu selalu kami pastikan sesuai dengan kaidah dan metodologi yang terstandar internasional dan juga mengedepankan kualitas data dan juga kami tidak bisa diintervensi karena data yang harus yang kami hasilkan harus bisa dipertanggungjawabkan objektivitasnya.

Tugas pokok kami tentunya sesuai dengan Perpres “melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”, dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Jadi Ibu, kita Indonesia sudah melalui dua kali krisis, tetapi Undang-undang Statistik masih belum berubah. Jadi, kami masih mengacu kepada Undang-undang Statistik Tahun 1997. Kemudian peraturan turunan dari Undang-undang Statistik ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Dengan demikian, kegiatan utama kami adalah menyelenggarakan statistik dasar melalui kegiatan sensus dan survei untuk menghasilkan statistik resmi negara.

Selanjutnya Bapak dan Ibu, adalah di slide 6.

Di mana dalam slide ini kami ingin menyampaikan sekilas mengenai kegiatan sensus yang dilakukan oleh BPS. Karena namanya sensus, ini tidak sampling, tetapi semua didata tanpa terkecuali. Kami berdasarkan Undang-undang Statistik, itu kami memiliki kewajiban melakukan tiga buah sensus. Sensus penduduk, ini selalu kami lakukan untuk tahun yang berakhir nol (0). Jadi, terakhir adalah tahun 2020 Bapak dan Ibu. Sensus penduduk mendata penduduk Indonesia, mengumpulkan karakteristik pokok, dan rinci seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali.

Kemudian, untuk sensus pertanian itu kami melakukan sensus yang dilaksanakan pada setiap tahun yang berakhir tiga (3). Jadi, yang terakhir kami lakukan tahun 2023. Jadi, setiap jenis sensus dilakukan per 10 tahun sekali, 2010-2020 sensus penduduk, kemudian 2013-2023 adalah sensus pertanian. Dan sensus pertanian ini dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh petani, perusahaan pertanian, dan pengukuran objek kegiatan statistik pertanian. Jadi, ini pendataan seluruh kegiatan dan aktivitas di sektor pertanian.

Berikutnya adalah sensus ekonomi Bapak dan Ibu. Sensus ekonomi ini dilaksanakan pada setiap pada tahun yang berakhiran enam (6), sehingga nanti dalam waktu dekat pada tahun 2026 kami akan melakukan sensus ekonomi. Dan tentunya persiapannya sudah kami mulai lakukan, dan tahun depan tahun 2025 kami akan melakukan persiapan pelaksanaan sensus ekonomi secara intensif. Dan sensus ekonomi ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh perusahaan dan kegiatan usaha di bidang ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Tapi ini tidak termasuk pertanian, karena sensus pertanian sudah dilakukan, untuk pertanian sudah dilakukan pada sensus pertanian.

Adapun selain sensus Bapak dan Ibu, kami juga melakukan survei. Kalau survei ini karena survei pasti sampling Pak, tidak mendata ke seluruhnya. Jadi, untuk survei setiap tahun kami kira-kira melakukan sekitar 250-an kegiatan survei, di mana kalau kita bagi berdasarkan bidangnya, untuk survei yang terkait dengan bidang sosial ini Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), kami lakukan dua kali dalam setahun, setiap bulan Maret dan September.

Lalu, kemudian untuk Survei Angkatan Kerja Nasional ini Sakernas, kami lakukan dua kali setahun, dan ini setiap bulan Agustus, Februari dan Agustus. Kemudian, ada pendataan potensi desa, Survei Penduduk antar Sensus, ini SUPAS akan kami lakukan di tahun 2025 karena antar 2020, tengah-tengah antara 2020 dengan 2030. Survei Perilaku Anti Korupsi, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.

Untuk yang bidang produksi kami melakukan Survei Statistik Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Survei Statistik Perusahaan Peternakan dan Rumah Pemotongan Hewan, ada Survei Statistik Perusahaan Perikanan, dan lain sebagainya.

Untuk yang terkait dengan ekonomi, kami melakukan Survei Harga Konsumen untuk menghasilkan data inflasi. Kemudian ada Survei Harga Perdagangan Besar, Survei Harga-Harga di Pedesaan, ada Survei Biaya Hidup, Survei Perusahaan Industri Besar dan Sedang, Survei Tingkat Penghunian Kamar Hotel, dan seterusnya.

Bapak dan Ibu, kami itu adalah lembaga yang satu-satunya menghasilkan indikator yang dijadikan rujukan dalam memonitor progres pembangunan. Misalnya Bapak Ibu, yang kami rutin dan ini adalah menjadi indikator utama pembangunan antara lain adalah pertumbuhan ekonomi, kami hasilkan setahun empat kali atau setiap triwulan, tingkat kemiskinan kami hasilkan setahun dua kali, tingkat pengangguran terbuka ini setahun dua kali, inflasi kami hasilkan tiap bulan, rasio gini, IPM (Indeks Pembangunan Manusia), nilai tukar petani, dan nilai tukar nelayan, ini biasanya Bapak dan Ibu indikator-indikator ini dibahas pada saat penyusunan RUU APBN di Komisi XI. Karena angka-angka inilah yang kemudian menjadi penentu dalam penyusunan sasaran pembangunan maupun asumsi dari APBN.

Berikutnya, di slide 9.

Ini beberapa capaian dan penghargaan dari BPS. Di mana kami di panggung Global, kami juga berkontribusi sebagai *chair* dalam diskusi tentang *Register Based-Census pada The 54th Session Of The United Nations Statistical Commission* di New York. Kemudian, kami juga pernah menjadi tuan rumah untuk *The 13th Session of the ASEAN Community Statistical System Community*. Kami juga sudah ditetapkan oleh UN sebagai *Regional Hub on Big Data and Data Science* di kawasan Asia Pasifik. Jadi, ini BPS sekarang menjadi *regional hub* untuk kawasan Asia Pasifik.

Untuk pelayanan publik, kami memperoleh predikat informatif atau kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik. Kemudian, kami juga memperoleh beberapa penghargaan seperti menjadi top 10 lembaga dengan predikat pelayanan prima dan penghargaan tiga terbaik penggunaan produk dalam negeri. Untuk SDM kami juga masuk dalam kategori patuh pada pelaksanaan Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku (NKK) ASN, dan peringkat tiga kategori Elemen Implementasi Manajemen ASN dan Pemanfaatan Sistem Informasi.

Bapak Ibu yang saya hormati,

Untuk isu strategis pembangunan bidang statistik tentunya berdasarkan Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. BPS memperoleh tugas untuk mengkoordinasikan dan mengukur indikator sasaran visi dan indikator utama pembangunan. Ada 10 indikator dalam sasaran visi Indonesia Emas dan 45 indikator utama pembangunan, ini yang dan ditugaskan dikoordinasikan oleh BPS.

Kemudian dalam satu data Indonesia, BPS berperan untuk membina data statistik, menetapkan metadata, dan standar data statistik nasional. Dan juga untuk transformasi statistik nasional kami, apa melakukan transformasi statistik nasional ini untuk terus mendorong penyelenggaraan sistem statistik nasional ini dapat diperkuat ke depannya. Selain itu, kami terus mengembangkan dan menerapkan metodologi statistik yang berstandar internasional dan *up to date* terhadap perkembangan zaman, serta kami juga sekarang mulai untuk terus mengembangkan pemanfaatan sumber *big data* dan penerapan *data science* untuk menghasilkan data-data statistik yang lebih bervariasi dan berkualitas.

Selain itu Bapak dan Ibu, kami juga mendorong transformasi statistik di dalam BPS ini. Karena sebagai salah satu program pemerintah, yaitu proses akses Indonesia dalam keanggotaan OECD. Nah, salah satu komite dari 26 komite OECD yang ditetapkan adalah komite untuk *statistics and statistical policy*. BPS sebagai ketua dari komite tersebut, untuk proses akses Indonesia ke OECD dan kami sekaligus untuk melakukan transformasi dan reformasi dalam penyediaan data statistik, sehingga data statistik yang kita hasilkan ini dalam melalui proses yang sesuai dengan standar internasional.

Untuk arah pembangunan bidang statistik 2025-2029, kami menyediakan dan menyelenggarakan kegiatan statistik untuk prioritas nasional. Seperti untuk statistik sosial kami melakukan tadi Susenas, Sakernas, Podes, dan persiapan SP 2030. Untuk statistik produksi, kami menyediakan data produksi padi dan jagung yang menjadi referensi nasional, kemudian statistik distribusi dan jasa ini dua selama 5 tahun ke depan kegiatan prioritasnya adalah sensus ekonomi 2026, survei harga, kemudian perdagangan internasional, data ekspor dan impor, dan juga data pariwisata. Selain itu, juga neraca nasional termasuk data-data PDB maupun *National Account*, dan kemudian tahun depan kami akan melakukan *rebasings* dari statistik PDB, ini akan menjadi prioritas kami ke depan.

Kedua, adalah penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral. Ketiga, penyelenggaraan pembinaan statistik untuk desa dan perguruan tinggi. Keempat, penyelenggaraan evaluasi statistik sektoral pada K/L dan Pemda, lalu juga yang tadi kami sampaikan, kami akan mendorong transformasi Statistik Nasional sekaligus kita melakukan berkontribusi pada proses akses Indonesia menjadi anggota OECD, dan keenam transformasi digital melalui pembangunan sistem infrastruktur statistik nasional dan juga penguatan regulasi statistik yang kami harapkan RUU Statistik dan regulasi turunannya dapat kita dapat diselesaikan untuk terus memperkuat dan juga melakukan *updating* supaya BPS ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kekinian, Bapak-Ibu. Karena Undang-undang Statistik yang tahun 1997 umurnya sudah lebih dari 20 tahun, dan ini tentunya sudah harus kita *update* karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

Terakhir, Bapak dan Ibu untuk program kerja dan anggaran BPS Tahun Anggaran 2025, kami memperoleh anggaran sebesar Rp5,7 triliun, di mana untuk program penyediaan pelayanan dan informasi statistik Rp2,2 triliun, dan program dukungan manajemen terutama untuk pembayaran gaji seluruh karyawan kami di Indonesia, beserta baik operasional maupun non operasional sekitar Rp3,5 triliun.

Demikian sekilas kami, Badan Pusat Statistik Indonesia, dan tentunya kami siap untuk terus berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua di Komisi X.

Terima kasih.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X DPR RI):

Walaikumsalam.

Baiklah.

*Kayu gaharu kayu cendana,
Ada juga kayu albasia,
Silakan para anggota kalau mau bertanya,
Kita bahas inovasi riset dan statistik Indonesia.*

Nah, jadi teman-teman, Kapoksinya masing-masing yang hadir atau yang mewakili mohon dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa memulai secara singkat, mungkin siapa saja anggota yang hadir dan silakan dimulai satu orang untuk melakukan pendalaman.

F-PDI PERJUANGAN (BONNIE TRIYANA, S.S.):

Terima kasih, Ibu Ketua.

**Yang saya hormati, Pimpinan Komisi X,
Yang saya hormati dan banggakan, kawan-kawan kita Komisi X,
Dan juga yang saya hormati dan banggakan, Bapak Laksana Tri Handoko,
Kepala BRIN serta Pak Wakil Kepala BRIN, Pak Amarulla Octavian, ini
teman lama dan jajaran dari BRIN.
Kemudian yang saya hormati dan banggakan, Ibu Amalia Plt. Kepala BPS
beserta jajaran.**

Selamat datang Bu di Komisi X.

Kami dari poksi PDI Perjuangan, saya Bonnie Triyana anggota nomor A232. Saya juga ada teman-teman di sini. Ini yang ganteng-ganteng ini, ini Bang Once Mekel, nggak perlu saya perkenalkan udah kenal. Kemudian, ada Bang Denny Cagur, kami bukan dari grup Dewan 19, Pak.

Baru ngeh ini, baru ngeh.

Ya, juga ada Ibu Wakil Ketua Ibu Esti Wijayati. Mungkin izinkan saya bertanya langsung kepada Bapak Kepala BRIN. Saya ini...

**KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X
DPR RI):**

Saya kasih 3 menit ya untuk pertanyaan, ya.

F-PDI PERJUANGAN (BONNIE TRIYANA, S.S.):

Boleh.

**KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X
DPR RI):**

Kalau perkenalan tadi nggak dihitung.

F-PDI PERJUANGAN (BONNIE TRIYANA, S.S.):

Iya, boleh Ibu Ketua.

Singkat saja, saya baca berita nih, Pak Kepala BRIN. Dari tempo disebutkan ada wacana memindahkan artefak dari Papua ke gudang BRIN di Cibinong. Begitu pula ada berita tentang pemindahan artefak dari Barus ke gudang BRIN di Cibinong. Ini saya pernah berpengalaman jadi sekretaris tim repatriasi koleksi asal Indonesia di Belanda Pak, kita pernah berusaha sudah sebagian besar sudah dikembalikan ke Indonesia. Prinsipnya adalah kita tidak ingin mencerabut benda-benda budaya tersebut dari tempat asalnya, satu. Yang kedua, tentu para peneliti dan pemilik dari pemilik tradisional dari benda cagar budaya tersebut kan nanti terpisah dari warisan kebudayaan mereka. Saya mau tanya saja, apakah ini satu kebijakan yang memang sedang dijalankan atau baru sekadar wacana?

Yang kedua, pertanyaannya, saya juga mendengar mungkin juga ini kebijakan dari BRIN sendiri tentang sentralisasi para peneliti. Itu saya mohon penjelasannya. Karena banyak peneliti mungkin yang berada sudah terlanjur bekerja kemudian komunitas penelitian, habitat penelitiannya di daerah-daerah tertentu di Indonesia yang kemudian harus pindah karena kebijakan ataupun karena ada program dari BRIN.

Saya hanya ingin minta tanggapannya saja. Begitu mungkin, Ibu Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X DPR RI):

Baik.

Terima kasih, Mas Bonnie, yang juga merupakan sejarawan jadi sangat memiliki kepedulian terhadap hal-hal yang ditanyakan tadi nanti ditanggapi.

Selanjutnya dari Fraksi Partai Golongan Karya. Izinkan saya memperkenalkan beberapa anggota yang sudah ada di ruangan ini.

Pertama adalah Bapak Ashraff Abu dari Jateng X. Nah, kemudian Bapak Agung Widyantoro, S.H., M.Si., dari Dapil Jawa Tengah IX yang juga merupakan Pimpinan dari MKD yang sangat ditakuti oleh anggota, hati-hati. Dan juga Bapak Drs. Juliyatmono, M.M., M.H., dari Jawa Tengah IV. Ini lebih hati-hati karena mereka ini *some how* nih, ada dua mantan kepala daerah dan juga ada yang *existing* ibunya masih kepala daerah. Jadi pasti banyak keterkaitannya dengan isu-isu inovasi dan juga statistik.

Selanjutnya, mungkin diberi kesempatan siapa yang ingin menanggapi Pak Agung, *monggo*.

F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Baik.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X DPR RI):

Nanti kita bergiliran.

F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X DPR RI):

Ibu Karmila di mana?

Oalah.

Mohon maaf, karena biasanya tuh beliau ada *spot*-nya di sini, mohon maaf Ibu. Jadi, hadir juga ini Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M. Beliau dari Dapil Riau I, tadi rapat di sebelah terkait Baleg. Bu, titip RUU terkait Statistik ini ya, Bu.

Nah, sudah masuk. Oh, *alhamdulillah* sudah ada laporan ini, dari beliau. Kita beri semangat dong kalau gitu ya, *alhamdulillah* masuk di Prolegnas.

Cepat nih, gercep-gercep.

Jadi, siapa yang akan ini Ibu Mila atau Pak Agung, atau satu.

F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Baik, nanti akan dilengkapi oleh sahabat saya.

Untuk BRIN Bu, ini ada aspirasi dari kalangan peneliti di lingkungan kampus. Banyak sekali dikeluhkan bahwa *scheme* penelitian ini sering kali datangnya terlambat, mulai dari awal pengumuman sampai dengan pendanaan. Dan padahal kawan-kawan di lapangan ini sering kali dikejar laporan di tahun itu juga. Ini mudah-mudahan masuk di wilayahnya BRIN, ya.

Kemudian, ini yang mengakibatkan waktu penelitian ini rentangnya terlalu pendek. Kemudian, *scheme* unggulan atau *scheme* tematik yang sesuai *track record review*-nya ada permintaan dari kawan-kawan ini jangan disamakan dengan yang reguler. Lalu usul untuk BRIN, seyogyanya atau diharapkan BRIN mengumpulkan membuat *research group* se-Indonesia. Membuat konsorsium *research group* sesuai dengan tema atau topik, misalkan topik *cancer*, talasemia, tuberkulosis, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini aspirasi sehingga saya perlu sampaikan.

Terkait dengan BPS, saya terkesan sekali. Ini sahabat baru BPS ketemu di sini. Saya juga warga baru karena sebelumnya saya di Komisi II. Kami sering kali mencermati apa kawan-kawan di, di daerah tentang data kemiskinan, ya. Data kemiskinan ini kadang apa yang ada di hasil pendataan dan juga di lapangan ini berbeda. Ambil contoh soal bantuan sosial, ya. Banyak tidak tepat sasaran, tidak sedikit juga mereka yang sudah meninggal kemudian masih mendapatkan. Lalu mereka yang rumahnya mewah tidak tetapi layak dan tergolong mampu, dia menerima. Bukan kemudian format solusinya terus rumah ditempel 'rumah warga miskin' supaya mereka enggan. Saya rasa bukan di situ cara penyelesaiannya, tetapi coba ditelusur *something wrong*, menurut saya. Kadang kawan-kawan pendata statistik ini di daerah-daerah, taruhlah Jawa di Dapil kami Brebes, Tegal, dan Kota Tegal, itu ada data meja dan data lapangan. Seringkali mereka tidak, tidak sampai menjangkau ke lokasi itu.

Lalu, yang lebih menarik lagi, di tempat kami pun juga banyak pekerja migran. Pada saatnya pada waktu dia bekerja di luar, dia mendapatkan penghasilan, tetapi ketika sudah tidak bekerja lagi, kontraknya habis dan sebagainya, balik kampung kemudian duit bekal kerja di sana sudah habis mau berangkat lagi mungkin sudah termakan usia, ini menjadi data kemiskinan baru. Kami berharap data yang ada ini kalau bisa datanya data dinamis. Hanya sering kali saya mendapatkan bahwa teman-teman BPS, *mbok* tolonglah jangan pendekatannya pendekatan *project* gitu loh, maaf ya, maaf sekali.

Saya rasa itu lebih kepada bagaimana data ini bisa di-*endorse* semua instansi lembaga, tapi sifatnya dinamis. Ada kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, gitu dan sebagainya, dan sebagainya.

Saya rasa singkat itu dulu, Bu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X DPR RI):

Beda ya, memang kalau mantan kepala daerah itu. Iya.

F-P. GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Beda lagi kalau sang mantan, Bu.

Ada yang ditambahin?

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X DPR RI):

Aduh, lanjut ya.

Kita ke fraksi Partai Gerindra. Bapak Ali Zamroni, ini selaku Kapoksi.

Kami persilakan.

F-P. GERINDRA (ALI ZAMRONI, S.Sos., M.A.P.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati anggota Komisi X dan Pimpinan Komisi X.
Bapak-Ibu dari BRIN dan dari BPS.**

Kami mengucapkan selamat datang di Komisi X, karena baru kali ini kita bisa bermitra.

Saya di Komisi X dari Fraksi Gerindra ada enam orang, tapi hari ini hadir dua orang. Nama saya Ali Zamroni dari Fraksi Gerindra A 132 dari Dapil Banten I, itu Pandeglang, Lebak. Dan di sini juga hadir Ibu Rubi ya, dari Dapil Lampung I.

Saya sendiri terus terang tidak terlalu familiar dengan dua mitra, karena baru kita akan observasi, pembinaan. Tetapi ada beberapa hal yang coba kami sampaikan. Pertama, ini anggaran ini dari BRIN 5,8 tapi besar sekali buat gaji pegawai, 3,8 ya, Pak. Sisanya 2 triliun itu baru untuk yang lain-lain. Ini kelihatannya kalau begini harus ditambahin lagi anggarannya nih untuk melakukan riset ya, artinya beban yang tadi disampaikan Kepala BRIN ini kan banyak sekali program yang disampaikan.

Riset-riset ini yang yang sudah dilakukan itu Pak, itu banyak dipakai nggak sama kementerian dan lembaga? Terkait dengan program-program pemerintah. Contohnya yang ke depan ini, Bapak juga harus bisa mempersiapkan terkait dengan riset bagaimana swasembada pangan, bagaimana hilirisasi, bagaimana swasembada energi. Ini kan menjadi melalui *research* semua itu, ini bagaimana persiapan dari BRIN itu sendiri.

Yang kedua, tumpang tindih nggak sih dengan Dikti dan Kemendikti Sains dan Teknologi? Ini mohon kami yang awam ini tolong dijelaskan Pak terkait dengan ini. Karena ini kan sama-sama riset, jadi ini menjadi bias buat kami. Supaya nanti kami bisa tahu batasan-batasan, "Oh, yang ini kewenangan ya BRIN, yang ini kewenangannya Dikti dan Sains dan Teknologi".

Yang ketiga Pak, terkait pelibatan PTN-BH. Ini kemarin kami sudah rapat dengan beberapa perguruan tinggi, di antaranya UI ada ITB, bahwa mereka itu merasa terpinggirkan karena industri itu melakukan riset tersendiri ya, ini mana yang benar ini? Karena kita berharap bahwa PTN-BH ini punya *sense* bagaimana mendukung program pemerintah yang menurut kami ini adalah sekaranglah waktunya untuk melakukan sumbangsih pemikiran, bagaimana riset-riset dalam berbagai hal, ini dilakukan secara mendalam supaya kita bisa menjadi tidak ketergantungan dalam berbagai bidang terhadap negara lain.

Saya rasa itu Pimpinan yang saya sampaikan.

Terima kasih.

Wallahulmuafiq ila aqwamit thariq. Walafuminkum.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X DPR RI):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Bang Azam.

Selanjutnya ini dari Fraksi Partai Nasional Demokrat atau Fraksi Nasdem. Saya lihat ini hampir *full team* nih, luar biasa.

Silakan Mbak Ratih Megasari Singkarru, M.Sc., untuk memperkenalkan dan juga menyampaikan tanggapannya.

F-P. NASDEM (RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc):

Ya. Baik, terima kasih Ibu Ketua.

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati, Ibu Ketua beserta seluruh Pimpinan serta seluruh anggota Komisi X, dan juga kepada Kepala BRIN Bapak Dr. Laksana Tri Handoko, lalu juga Kepala Ibu Amalia Adininggar Widiasanti.

Selamat bergabung di Komisi X yang dikenal dengan komisi peradaban. Semoga betah ya Bapak Ibu, *insyaallah*, beserta seluruh jajaran juga tentunya.

Pertama, saya ingin mengenalkan pasukan kami yang hampir lengkap. Di sebelah kiri saya ada Ibu Lita Machfud dari Jatim I. Lalu di belakang ada Prof. Furtasan, sebelah kiri paling ujung, bisa berdiri mungkin, beliau dari Banten II ya Prof? lalu tadi ada Bu Eva Stefany, tapi beliau izin karena harus ke rumah sakit. Lalu, ada satu lagi, ada satu lagi Ibu Nilam, beliau dari Sulawesi Tengah, dan saya sendiri Ratih Megasari Singkarru dari Dapil Sulawesi Barat. Lalu juga terakhir ada Ibu Lestari Moerdijat, beliau juga merupakan salah satu Wakil Ketua MPR kami, beliau dari Dapil Jateng IV, kalau nggak salah ya beliau.

Ya, baik. Sebelumnya Ibu Ketua izin, saya tahu hanya diberikan waktu 3 menit, tapi mudah-mudahan sedikit diberikan kelonggaran apabila waktu sudah berbunyi karena cukup banyak catatan dari Fraksi Nasdem. Dan saya tidak janji ini indah untuk didengar, terkhusus untuk BRIN. Jadi mudah-

mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi masukan yang membangun agar lembaga BRIN tentunya bisa semakin bermanfaat dalam berbangsa dan bernegara.

Pertama untuk BRIN, Pak Dr. Laksana Tri Handoko. Kami menyadari bahwa banyak sekali suara yang berbunyi baik itu dari media *online* ataupun sosmed lainnya yang cukup masif dan tentunya ini tidak bisa diabaikan atau dibiarkan.

Pertama, saya ingin bergerak ke arah birokratisasi yang berada di dalam BRIN. Yang di mana ini banyak sekali kegelisahan baik itu dari para ilmuwan ataupun peneliti serta kalangan masyarakat pada umumnya, yang di mana mereka kerap mempertanyakan terkait birokratisasi di dalam BRIN yang memiliki dugaan memperlambat proses riset dan inovasi dengan alih-alih mempercepatnya. Restrukturisasi yang dilakukan BRIN ternyata yang dalam identifikasi temuan kami itu berdampak dengan adanya tumpang tindih kewenangan serta prosedur yang cukup berbelit, Pak. Dan hal ini cukup menciptakan ketidakjelasan peran antara pengelola administrasi dan juga ilmuwan, yang di mana menghambat kolaborasi efektif dan fleksibilitas dalam menjalankan penelitian.

Yang kami khawatirkan Pak, dari Fraksi Nasdem adalah jangan sampai birokrasi ini menjadi lebih dominan dibandingkan peran ilmuwan itu sendiri. Kami khawatir kalau itu terjadi, maka BRIN akan sulit untuk mewujudkan visi riset serta kolaboratif dan inovatif.

Lalu berikutnya dalam pelaksanaannya BRIN ini kami melihat BRIN ini lebih mengutamakan sentralisasi dalam tata kelola riset dan ini menyebabkan kami melihat BRIN ini cukup lemah dalam mengelola riset di berbagai daerah, sehingga mengurangi pemahaman mendalam dan sensitivitas terhadap konteks budaya dan juga sosial masyarakat setempat. Struktur birokrasinya itu kami melihat juga cukup kaku Pak, dan sangat berpusat. Sebagaimana hal ini pun ternyata banyak dikritik oleh berbagai pihak dan ini membuat BRIN cenderung mengutamakan pendekatan riset yang cukup seragam, berstandar nasional dan juga internasional yang seringkali justru mengabaikan keberagaman lokal. Sebenarnya dengan standar seperti itu bagus, Pak. tapi yang tidak bagus adalah kalau kita meninggalkan kearifan lokal yang berada di daerahnya masing-masing.

Dan kita tahu bahwa BRIN ini merupakan peleburan dari banyak lembaga gitu ya, tadi juga sudah dijelaskan di awal dan kami melihat bahwa setiap lembaga itu memiliki *nature* ataupun karakteristik masing-masing dan itu berbeda-beda. Dan sebaiknya, kami melihat sebaiknya penggabungan ini tidak kemudian melakukan perubahan terhadap *nature* itu sendiri Pak, di berbagai lembaga yang sudah tergabung. Dan ini sangat menjadi *concern* kami Pak, karena boleh dikata, Ibu Wakil Ketua MPR kami, Ibu Lestari Moerdijat, beliau sangat bersentuhan langsung dengan beberapa hal yang ada di dalam BRIN. Jadi, kami pun sangat menyoroti hal ini.

Karena kami juga melihat hal ini menyebabkan riset yang dilakukan itu jadi kurang relevan dengan kebutuhan spesifik daerah seperti yang tadi saya sampaikan. Serta ini menyulitkan integrasi antara pengetahuan tradisional dan juga metode ilmiah modern, dan selain itu ketergantungan pada kebijakan pusat yang tidak selalu melibatkan partisipasi komunitas lokal yang mengurangi efektivitas dan keberlanjutan riset, sehingga memang peluang untuk mengembangkan inovasi yang berakar pada kearifan lokal itu jadi terbatas jadinya.

Lalu, tadi sudah beberapa teman-teman membahas terkait sentralisasi SDM yang kemungkinan akan dilakukan oleh BRIN dengan melalui migrasi peneliti ke pusat yang menurut kami Pak, ini juga perlu direformulasi, karena ini melemahkan fungsi perbantuan seperti yang diamanatkan di dalam asas otonomi daerah, Pak.

Lalu, berikutnya saya ke anggaran. Saya ingin membahas terkait keberpihakan anggaran, tadi juga sudah beberapa dibahas oleh teman-teman. Riset kita secara nasional dulu 2024 itu kurang lebih di angka 6 triliun Pak, lalu di 2025 kita turun tadi menjadi 5,8 triliun dengan porsi dukungan manajemennya itu 3,8 serta sisanya itu untuk riset dan lain-lainnya hanya sekitar 2 triliun. Ini tercermin Pak, bahwa sepertinya negara belum memberikan porsi yang layak untuk memajukan RnD kita melalui BRIN ini.

Dan kalau saya bisa *compare* dengan negara-negara lain, contoh seperti Malaysia yang di mana dia itu apa namanya mengalokasikan 1% dari GDP negaranya, Singapura 2%, Jepang dan USA itu 3%. Sedangkan kita Indonesia itu 1% aja tidak nyampai Pak, bahkan 0,1% pun tidak. Kita itu kurang lebih sekitar 0,06%.

Jadi, ini sebenarnya tugas kita sekarang di Komisi X bahwa apalagi teman-teman di Banggar ini juga cukup banyak Pak, sekitar ada 8 orang kalau yang saya tahu. Jadi Bu Ketua, mudah-mudahan, *next* angka 5,8 ini tidak boleh terjadi lagi kalau kita ingin memajukan riset kita gitu ya. Jadi, semoga kita satu frekuensi Pak terkait hal ini dan juga semoga didukung oleh teman-teman lain.

Dan oleh karena itu, kita punya beberapa rekomendasi. Pertama, penguatan kolaborasi nasional dan internasional BRIN, itu juga sebaiknya fokus pada pengembangan kolaborasi dengan berbagai institusi riset nasional yang di mana itu harus berada di luar BRIN dan juga institusi riset internasional. Dan kolaborasi ini tidak hanya untuk meningkatkan kualitas riset tapi juga membantu lembaga untuk terhubung dengan komunitas global sekaligus memberikan kebermanfaat langsung pada kebijakan pemerintah negara dan juga masyarakat Indonesia, sehingga dapat mengurangi dominasi politik dalam menentukan arah riset.

Lalu, juga membangun kemitraan dengan komunitas lokal Pak, sekali lagi seperti yang tadi saya bahas ini juga penting dengan melibatkan tokoh adat untuk meningkatkan relevansi riset berbasis kearifan lokal. Serta pelatihan metodologi partisipatif bagi peneliti dan skema pendanaan khusus untuk riset kearifan lokal juga ini diperlukan untuk mendukung keterlibatan masyarakat

serta keberlanjutan penelitian. Karena di lapangan ternyata banyak juga Pak, yang bersuara peneliti-peneliti kita ini kurang dana untuk melakukan penelitian.

Jadi, terkait hal ini menurut saya ini harus menjadi catatan penting. Dan dan mungkin itu sekali lagi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi masukan yang cukup membangun untuk kemajuan BRIN.

Terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X DPR RI):

Luar biasa ya, masukan yang sangat membangun, kritikan dan catatan-catatan kritis ini menurut kami pantas ya untuk menjadi masukan di *follow up* nanti oleh teman-teman dari BRIN.

Selanjutnya kita beri kesempatan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya minta Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si. atau Puang Andi dari Sulawesi Selatan II yang juga anggota BKSAP untuk memperkenalkan teman-teman dan memberikan tanggapannya.

Silakan.

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Baik. Terima kasih, Bu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak Ibu semuanya yang saya hormati.

Alhamdulillah.

Pak Dr. Laksana Tri Handoko beserta jajaran dan Ibu Amalia Adininggar, Bu Dokter.

Alhamdulillah, Bapak-Ibu semuanya ini kesempatan pertama. Jadi, langsung saja kepada Pak Laksana, begini ini kan baru *highlight* tapi seterusnya sudah banyak yang sampaikan.

Ada *adagium* tempo itu bahwa enak dibaca dan perlu. Tapi saya membaca edisi minggu ini tidak enak dibaca dan tidak perlu menyangkut dengan BRIN ini. Bapak sudah jawab enggak, ini rusak semua kita BRIN di sini, ini delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, nggak ada bagus-bagusnya

BRIN di sini. Tolong dijawab Pak, ini halaman 35 sebelum disinyalir bahwa Bapak itu tidak diterima oleh pemerintahan baru, itu ada di sini.

Yang kedua, Bapak misalnya mestinya anggarannya itu bukan cuma 6 triliun, 7 triliun, tapi mestinya 200 triliun, mestinya begitu. Itu yang positifnya, tapi yang lainnya jelek semua.

Yang kedua, masalah birokrasi tadi yang disampaikan oleh Dapil Sulawesi Barat, Sulawesi ya, Sulawesi Barat. Pokoknya nggak enak lah Pak ini. Karenanya sebagai mitra, mitra kan bukan sekedar berkolaborasi Pak, tapi kami harus mengadvokasi mitra kita di sini. Saya pikir hal-hal ini nanti bisa dibaca kembali dan saya mengharapkan ada *both side* jawaban. Karena ini merusak ini tempo ini tentang BRIN ini. Di sebuah organisasi tidak jelas sini Bapak, betul di sini. Jadi, nggak perlu saya bicara lebih lanjut, tapi ini edisi minggu ini.

Baik itu saja sekedar informasi. Berikutnya, rapat-rapat berikutnya baru kita gas tentang ini.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X DPR RI):

Temannya dikenalkan dulu, dong.

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Oh iya, saya nggak memperkenalkan karena tupoksi saya yang *cakep* dan muda *ndak* kelihatan ini. Jadi, kami yang hadir di sini ada Pimpinan saya, Pak Lalu Hadrian, saya ini anak buah ini. Kemudian, di sini ada anggota Habib Syarif Muhammad. Jadi, kami bertiga yang hadir, yang lainnya tugas pilkada, Pak, kampanye. Anggota kami ada lima.

Baik, itu kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Kepada Ibu Amalia Adiningsih, dulu ini bukan sekarang, dulu itu ada juga buku itu *How to Lie with Statistic*, bagaimana berbohong dengan angka, itu dulu Bu. Jadi, kalau misalnya dulu di masa lalu belum sebelum berapa masa lalu itu kalau ada bicara harga telur, ayam, beras, kacang panjang, cabai keriting, kok beda di antara yang disebutkan di pasar dengan yang di yang disebutkan di radio-radio itu, biasanya pagi-pagi itu. Biasanya orang menangkal, orang kampung di tempat saya itu di Bone sana, beli saja katanya di radio bukan di pasar, karena berbeda. Oke, ini sekedar, sekedar anu saja Bu, refleksi masa lalu tentang statistik waktu kita masih tidak bagus-bagusnya.

Cuma ada satu pertanyaan saya Bu, setiap 5 tahun atau sebelum 4 tahun itu kita selalu bermasalah dengan DPT Pemilu. Pertanyaan saya apakah biro statistik juga bekerja sama dengan KPU? Setiap saat, setiap tahun, per 5 tahun, per 4 tahun itu masalah semua provinsi sampai kabupaten itu. Satu kabupaten, kabupaten lain itu tidak ada yang bagus angkanya itu tentang DPT, selalu bermasalah. Nah, apakah biro statistik, eh kepala statistik ini tidak

bekerja sama dengan mereka-mereka? Itu selalu bermasalah. Tapi itu juga memang bagian dari apa namanya kritik internal kita di DPR ini, kenapa? Amerika sudah 150 tahun merdeka, baru dua kali ganti undang-undang pemilunya. Nah, kita tiap 5 tahun ganti itu, tiap 5 tahun ganti itu undang-undang pemilunya.

Jadi, ini sekedar refleksi untuk kita semuanya bahwa kehadiran dua mitra kita ini kita *welcome* dan tentu saja akan bekerja sama, kemudian akan melakukan apa namanya advokasi masing-masing. Karena kebanggaan kami dengan mitra-mitra kami sebelum-sebelumnya, Bu. Karenanya kalau disebutkan misalnya menteri kembali lagi ke Bapak, kalau Menteri Pendidikan perguruan tinggi tidak menerima Bapak di sini disebutkan, tentu saja itu perlu dijawab, Pak. Atau kalau tidak ada ego sektoral, duduk bersamalah dengan Pak Profesor Satrio itu. Pokoknya dianggap Bapak tidak bisa mengintegrasikan 72 periset itu katanya nggak ada gak ada ilmunya menyatukan semua periset-periset itu, karena memang berbeda satu sama lain.

Saya pikir itu yang saya sampaikan, Ibu Pimpinan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap berlanjut dengan dua mitra kita ini yang depan.

Wallahulmuafiq ila aqwamit thariq.
Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X DPR RI):

Walaikumsalam,

Oke. Sekarang kita ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi PKS. Ada Teh Hj. Ledia Hanifa, S.Si., M.Psi.T., dari Dapil Jawa Barat I yang jabatannya banyak ya ini, ya Kapoksi, ya Bamus, ya Baleg.

Ya, silakan.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan anggota Komisi X yang berbahagia, mudah-mudahan sehat semua.

Kepala BRIN, Pak Dr. Laksana juga seluruh jajaran dari BRIN, dan juga Kepala Badan Pusat Statistik Ibu Amalia beserta seluruh jajaran.

Kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Di meja Pimpinan ada Bapak Mahfudz Abdurrahman dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VI, Kota Depok, Kota Bekasi. Kemudian juga ada Bapak H. Drs. Muhammad Iqbal Romzi dari Dapil Sumsel I, PPG, pakar pantun dan gurindam. Kemudian juga ada satu, dr.

Gamal, saat ini sedang ada di Badan Legislasi, beliau dari Dapil Malang Raya. Saya Ledia Hanifah dari Dapil Jawa Barat I, Kota Bandung, Kota Cimahi.

Ibu Ketua, kalau saya dengan Pak Laksana dan Bu Amalia ini nostalgia, karena beberapa undang-undang dibahas bersama beliau-beliau. Pertama, dengan Pak Laksana kita sama-sama bahas Undang-Undang 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Asal muasalnya BRIN itu kan dasarnya adalah Undang-undang 11 Tahun 2019 dan ketika teman-teman bilang, '*oh anggaran riset harus dinaikkan*', saya bilang *stop* dulu, jangan dinaikkan dulu, kenapa? Karena kita belum menyelesaikan PR, PR dari amanat Undang-undang No. 11 2019 adalah Rencana Induk Kemajuan Iptek. Betul, ya Pak?

Nah, jadi kita belum punya itu, kalau kita tidak punya itu, mengarahkan BRIN akan ke mana, mau riset Indonesia seperti apa, jadinya tidak bisa selesai. Jadi, PR besar kita adalah kita nggak punya rencana induknya itu. Dengan adanya rencana induk, seharusnya dalam amanat undang-undang itu dia menjadi acuan RPJPN. Ini anaknya sudah lahir, ibunya belum ada. Nah, gimana ceritanya? Mesti dipercepat berarti kan, Pak? Agar apa, agar kemudian kita apa yang dikhawatirkan Puang Andi tadi, gimana ketemuanya dengan Kementerian Ristek Sains, eh Kementerian Diktisaintek, saya belum hafal ini, masih agak *keder* ngomongnya, itu bagaimana ketemuanya.

Dalam diskusi kita pembahasan Undang-Undang No. 11 2019 Pimpinan, kita kemarin tuh sempat membicarakan kalau kampus melakukan riset dasar, maka badan riset, waktu itu namanya belum BRIN, badan riset yang dimaksud dia akan melanjutkan jirapnya. Kan Litbang Jirap kan penelitian, pengembangan, bang jirapnya itu diselenggarakan di badan riset yang akan dibentuk pada saat itu. Kesepakatan kita sebetulnya arahnya ke sana, dengan catatan sudah punya peta. Kalau sudah punya peta arahnya kan jadi lebih jelas. Kampus, katakanlah meskipun dia PTN-BH dia sudah punya spesifikasi arahnya mau ke mana. Katakanlah jurusan teknologi pertanian di IPB dengan di kampus lain, mereka punya spesifiknya masing-masing dan kemudian bisa memenuhi.

Kalau Pak Presiden Prabowo mengatakan saat ini soal ketahanan pangan penting, maka kemudian teknologinya akan dikembangkan masing-masing sesuai dengan desain. Jadi yang mau dikasih beasiswa LPDP siapa, yang jurusan apa, kemudian yang mau ada riset dasar di kampus bagaimana, yang mau apa yang dikirimkan ke luar negeri yang mana, kan nggak semua harus ke luar negeri, dalam negeri mungkin akan lebih bagus dan riset apa yang dikerjakan oleh BRIN.

BRIN ini penelitiannya luar biasa banyak, karena digabungkan. Saya membayangkannya organisasi sebesar ini jalannya aja susah Pak, ya kan Pak ya? Tadi kata Puang Andi juga 3,8 nya untuk dukungan manajemen bukan perkara mudah dan tentu persoalan terbesarnya menurut saya adalah di tata kelola. Tata kelola BRIN-nya sendiri yang perlu sangat diperhatikan. Karena aturan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2019, sebetulnya karena kita menghargai profesi peneliti, maka peneliti itu kita tambahkan untuk peneliti

utama usia pensiunnya bertambah menjadi 70 tahun, betul kan Pak, ya. Kemudian peneliti madyanya 65 tahun, karena apa karena meneliti itu adalah satu proses yang terus bertambah, yang nggak bisa didapat dari sekedar sekolah. Ketajaman mereka melakukan penelitian, kemudian bagaimana pengembangannya, memastikan evaluasinya, apalagi kalau penelitiannya jangka panjang.

Di dalam undang-undang itu di mungkinkan penelitian tahun jamak. Tapi persoalannya anggaran kita masih pada anggaran yang normal, bukan anggaran tahun jamak untuk penelitian. Udah bikin kajian, pesan bahan, bahannya cuman ada dari luar, begitu datang sudah Oktober, habis.

Pimpinan, saya izin tambah sedikit lagi.

Jadi, ini PR besar buat kita. Target pertama, menurut saya yang harus diselesaikan oleh BRIN adalah rencana induk pemajuan IPTEK. Satu, PR saya itu besar karena supaya kemudian tidak bingung nih, BRIN di daerah mau diapakan. Kan sekarang nih kalau keliling ke daerah Pak, semua plangnya tuh BRIN-BRIN-BRIN-BRIN-BRIN, gitu. Ini BRIN yang sebelah mana? Dulu *mah* ada lembaga elektro, ada segala macam kan, sekarang semua jadi BRIN. Ada dulu BPPT, ada apa segala di daerah.

Nah, supaya mereka yang sudah terlatih sedemikian rupa yang kita sudah berikan penghargaan, penelitian mereka bisa *diexpand* karena mereka peneliti utama misalnya, ini menjadi lebih tertata, bisa bekerja dari mana saja. Apalagi kalau kalau penelitian yang spesifik mungkin nggak akan bisa ngantor kan, artinya memang dia di lapangan dan seterusnya. Maka harus disepakati dengan Pan-RB. Peneliti tidak bisa disamakan dengan orang yang ngantor. Sepakat nggak, Bapak-Bapak? Nggak sama, kan? Kalau dia harus melakukan riset panjang, nggak bisa lagi mengikuti apa yang disediakan kapasitasnya itu kapasitas seperti ASN birokrat. Ini harus ada khusus, berbeda dan itu yang harus disepakati.

Jadi, PR keduanya menurut saya pelaksana, PR keduanya adalah ngobrol dengan Menteri Pan-RB terkait dengan peneliti ini. Peneliti ini harus dipastikan, dijamin, sehingga kita nggak ribut dengan, "ini gimana ya caranya ya, supaya semua bisa terkontrol pekerjaannya?" ketika kita kemudian berpikir *works from anywhere*, bekerja boleh dari mana saja, tapi di Pan-RBnya nggak memadai nanti enggak akan ketemu, kasihan penelitiinya begitu. Kasihan penelitiinya, kasihan BRIN juga. Jadi, yang harusnya bisa tajam hasilnya jadi nggak tajam karena mentok di birokrasi. Jadi, ini penting menurut saya sama seperti guru. Guru kan juga enggak bisa disamain sama ASN birokrasi. Nah, ini yang menurut saya catatan PR kedua. Kan biasanya kalau murid ngasih PR ke guru, eh salah, guru ngasih PR ke murid, kalau kita anggota dewan ngasih PR ke Kepala BRIN.

Yang kedua, kepada Bu Amalia BPS. Statistik kita perlu statistik terpilah dan spesifik, Bu. Kita ngobrolnya sudah panjang ya Bu, terkait dengan sensus yang berkenaan dengan data kemiskinan. Karena data kemiskinan ini adalah pangkalan data untuk data pokok pendidikan, untuk bantuan sosial, untuk

DTKS, dan lain sebagainya. Problemnya adalah, karena ini data dinamis – orang saat ini punya pekerjaan, besok nggak punya pekerjaan, besoknya lagi punya pekerjaan lagi – itu kan tidak bisa hanya 10 tahun sekali, berarti harus ada data pendukung. Problem kita kalau ada kementerian mengeluarkan data biasanya selalu mengatakan “kami mengacu kepada sensusnya BPS”, tapi antar satu kementerian dengan kementerian yang lain kok hasilnya jadi beda? statistiknya kok nggak sama? Nah, ini jadi bagian yang menurut kami belum terselesaikan.

Kemudian yang berikutnya, statistik yang berkaitan dengan pendidikan atau pekerjaan karena ada amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diperlukan ada secara spesifik menyebutkan apakah yang bersangkutan disabilitas atau bukan dan ragam disabilitasnya, sehingga memudahkan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan akses dalam bidang pendidikan maupun juga dalam bidang ketenagakerjaan. Contoh, misalnya Jepang, Kementerian Pendidikannya memiliki data anak usia sekolah dasar itu berapa yang disabel, jenisnya apa, dan bahkan termasuk memasukkan *health impairment*, kendala belajar yang di akibatkan oleh kondisi kesehatan. Misalnya yang asmatis, yang alergi, diabetes, dan lain sebagainya itu sudah terdata.

Nah, bagaimana sensus yang dilakukan bisa memberikan dorongan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bisa memiliki data-data yang lebih lengkap seperti itu, sehingga menguatkan kita.

Demikian Pimpinan, PR-PR ya barangkali mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lebih dalam lagi karena ini hal yang menarik buat kita semua.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X DPR RI):

Karena Teh Ledia ini pelaku sejarah ya, melahirkan BRIN. Jadi, memang perlu kita dengar masukan-masukannya. Jadi, ditambah waktunya itu, oke.

Selanjutnya, kita beri kesempatan kepada Fraksi Partai Amanat Nasional. Ada Verrel dan juga Pak Hoerudin, ya?

Oh ya, Verrel. Silakan.

Mohon izin dulu ya, kita perpanjang dulu waktu karena tadinya kita ingin menyelesaikan pada pukul 3, tapi kita perpanjang kembali sampai dengan pukul 16.00.

Wah, ini berarti bersemangat sekali ya sampai dengan pukul 16.00 dan juga sekaligus saya nanti akan memberi kesempatan kepada Pimpinan, meja Pimpinan untuk menggantikan Ibu Esti, mohon izin ya Bu.

(PERGANTIAN PIMPINAN RAPAT)

Silakan.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Baik, Silakan.

F-PAN (VERREL BRAMASTA):

Baik.

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih banyak Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Bapak Kepala BRIN RI beserta jajaran,
Ibu Plt. Kepala BPS RI beserta jajaran,
dan seluruh anggota Komisi X yang saya hormati.**

Perkenalkan saya Verrel Bramasta dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Kami di sini dari Partai Amanat Nasional ada empat anggota. Izin tiga rekan saya tidak bisa hadir untuk hari ini karena ada giat yang tidak bisa diwakilkan. Ini juga sebetulnya mendadak, Ibu Pimpinan. Saya tidak di *briefing* akan memberikan paparan, tapi tidak apa-apa.

Sebelumnya saya dari Dapil Jawa Barat VII, Kabupaten Bekasi, Karawang, dan juga Purwakarta. Terima kasih sebelumnya atas paparan yang diberikan oleh Bapak Kepala BRIN dan Ibu Plt. Kepala BPS RI. Paparannya luar biasa *thorough* dan *in depth*. Jadi, sebetulnya saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, tapi sudah dijawab oleh Bapak Dr. Laksana Tri Handoko. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan tambahan terkait paparan yang diberikan oleh Bapak Dr. Laksana.

Saya sebetulnya setuju sekali, karena idealnya menurut UNESCO dan juga Bank Dunia harusnya anggaran untuk riset itu adalah 1% dari PDB. Namun, faktanya pada saat ini di tahun 2023 anggaran untuk riset itu hanya 6,5 triliun ya Pak, dan 2,2 triliunnya itu dialokasikan untuk riset yang lainnya untuk operasional. Jadi, saya sangat setuju tadi diberikan paparan oleh rekan-rekan saya harusnya anggarannya itu idealnya ada di Rp208 triliun. Jadi, mungkin pertanyaan dari kami Fraksi Partai Amanat Nasional, kira-kira apakah anggaran ini cukup karena yang disampaikan tadi kita disini adalah mitra. Jadi selain berkolaborasi kita juga harus bekerja sama untuk menyelesaikan

masalah ini begitu, karena memang riset dan inovasi ini adalah indikator sebuah negara itu maju dan sukses atau tidak.

Dan juga yang kedua, dengan sekarang adanya Mendiktisaintek, apakah ini tumpang tindih dengan tupoksi BRIN itu sendiri?

Mungkin itu pertanyaan dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah. Kebetulan saya juga periode pertama di sini. Dan terakhir, kata-kata dari saya, selamat datang di Komisi X, di komisi peradaban. Semoga 5 tahun ke depan ini kita bisa menghasilkan solusi-solusi, undang-undang, dan kerja sama yang baik untuk Indonesia.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Izin Ketua, karena Ketua akan ada tugas yang lain, Bapak-Ibu mohon izin saya melanjutkan untuk memimpin rapat kerja ini.

Berikutnya kami minta dari Fraksi Partai Demokrat untuk bisa mengenalkan anggotanya sekaligus mungkin ada yang harus disampaikan kepada Kepala BRIN maupun Kepala PBS RI.

Ada dari Demokrat?

Oh, *njih*.

Yang terhormat, Bapak Sabam Sinaga.

F-P. DEMOKRAT (Drs. SABAM SINAGA, M.M.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Terima kasih. *Monggo*.

F-P. DEMOKRAT (Drs. SABAM SINAGA, M.M.):

**Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan,
dan juga Bapak-Ibu anggota Komisi X.**

Kami dari Fraksi Demokrat ada tiga pasukan sebenarnya. Dua saat ini di badan lain, dan saya tinggal sendiri, jadi kesepian saya dari Demokrat. Saya perkenalkan diri saya, Sabam Sinaga dari Dapil Sumatera Utara II, A-538.

Baik. Berkait dengan pendalaman ya, Bu Pimpinan, saya ada beberapa poin yang saya mau coba sampaikan.

Pertama, mungkin ke BRIN. Terima kasih kepada Bapak Laksana Tri Handoko, iya bersama tim. Beberapa waktu yang lalu saya ada di Dapil Pak, ada di Dapil ada isu yang menarik tentang Piramid Toba. Iya Piramid Toba yang menurut saya itu bahkan mungkin juga menurut banyak orang menjadi sesuatu yang mustahil gitu loh Pak, ya. Kenapa saya sebut ini? Berkait dengan tata kelola yang nantinya menjadi bahan pikiran ataupun menjadi konstrain yang perlu dibenahi oleh BRIN. Kami mendapat banyak keluhan-keluhan terhadap bagaimana tata kelola di BRIN tersebut, termasuk didalamnya dari instansi atau lembaga lain menyangkut keberadaan BRIN. Maka berkaitan dengan isu Piramid Toba ini, yang perlu saya mau sampaikan adalah saya khawatir jangan-jangan ada banyak lagi nanti isu Piramid-piramid Toba yang akan muncul ke depan. Sehingga kami usulkan sekiranya BRIN itu ada prinsip kehati-hatian dalam mengelola kegiatan-kegiatan ke depan.

Dan dalam mengacu kepada kehati-hatian kegiatan ke depan, sependapat saya dengan apa yang disampaikan oleh rekan kami yang terdahulu. Sebaiknya BRIN ini mempersiapkan dulu tata kelola maupun *road map* ke depan bagaimana BRIN ini. 5 tahun ke depan perlu BRIN mempersiapkan rencana jangka menengahnya, sehingga itu yang menjadi acuan ruang lingkup kegiatan ataupun program-program yang nantinya akan dikerjakan oleh BRIN. Mengingat BRIN ini adalah fusi dari atau leburan dari beberapa lembaga, Pak. Sehingga dengan adanya *road map* BRIN ke depan, maka seluruh lembaga-lembaga yang disatukan itu bisa menyangkut atau mengkaitkan kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan baik secara *annual* per tahun maupun dalam jangka waktu panjang dalam seluruh kegiatan *research*.

Di samping itu, yang perlu menjadi perhatian bagi BRIN adalah dalam paparan yang tadi Bapak sampaikan, ada hal yang sangat menggelitik dan mungkin menurut saya ini bisa menjadi jebakan bagi Bapak, bisa menjadi jebakan bagi BRIN. Ada poin yang mungkin perlu nanti dijelaskan secara rinci ya, Pak. Pada halaman 5 slide yang dipaparkan itu, ada kalimat yang menyebutkan "setiap rupiah anggaran riset dari inovasi oleh BRIN itu akan menghasilkan *output* bernilai 10 kali lipat". Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kami. Dalam paparan yang disampaikan ada anggaran sekitar 2,7 triliun. Kalau kita kalikan Pak, 10 kali lipat berarti ada *output* atau *revenue* yang mungkin kalau dikonversi itu bisa Rp20 triliun yang akan dihasilkan oleh BRIN.

Jadi maksud kami di situ Pak, agar sekiranya ke depan BRIN itu membuat program-program yang lebih bagus ke depan. Dengan harapan BRIN ini menjadi salah satu pusat penelitian yang nantinya menghasilkan entah purwa rupa atau apapun namanya menjadikan kita masuk kepada muatan yang disampaikan dalam program Asta Cita negara RI ini. Kita mungkin nanti bisa masuk dalam ketahanan, swasembada tahanan energi, dan lain sebagainya.

Berkait dengan program-program kerja tahun 2025, mungkin nanti boleh dielaborasi kembali, Pak. Ada hal yang sepertinya perlu Bapak elaborasi kembali. Ini saya langsung aja ke titiknya, berkaitan dengan pengadaan kapal riset itu, kira-kira urgensinya apa sih itu Pak, ya? Saya lihat itu hampir 500 milyar untuk apa itu Pak, kapal risetnya, ya. Saya kira itu untuk BRIN.

Dan untuk BPS, terima kasih kepada Pimpinan BPS dan jajarannya. Beberapa kali saya mendapat SMS berkait dengan survei, termasuk di dalamnya survei wisatawan. Sesuai dengan visi dari BPS bahwa konteksnya BPS itu adalah menyediakan data statistik yang berkualitas dan *insight*, sehingga dengan data ini bisa dirumuskan kebijakan-kebijakan yang baik dan dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Berkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, SMS tadi Bu, kira-kira seberapa efektifnya SMS itu? Karena ketika saya dapatkan sama sekali saya cuekkan. Jangan-jangan seperti itu juga nanti masyarakat yang mendapatkan SMS tersebut. Perlu dievaluasi apakah SMS ini bisa menjadi sumber data yang *sahih* atau *valid* dalam penentuan kesimpulan-kesimpulan yang Bapak-Ibu tuangkan nanti dalam hasil sensus.

Oke, berkait dengan Asta Cita pemerintah, saya dapat informasi dari Kementerian Pendidikan bahwa visa kita itu rendah. Apakah dimungkinkan statistik ini, Biro BPS ini mengadakan sensus terhadap visa yang ada di Indonesia? Dan kalau dimungkinkan, daerah-daerah mana saja yang memiliki tingkat visa yang bagus atau visa yang rendah? Mungkin Bapak Ibu tahu apa itu visa ya berkait dengan pendidikan, gitu loh Pak.

Dan yang kedua, mungkinkah “karena menyangkut kepada Asta Cita itu ada satu poin di sana menyebut toleransi, toleransi beragama atau toleransi umat.” Apakah BPS bisa mengerjakan sensus terhadap seberapa tinggi tingkat harmonisasi penduduk yang ada di negara Republik Indonesia ini? Termasuk wilayah-wilayah, katakanlah Sumatera Utara seberapa besar tingkat toleransinya, daerah lain seberapa besar toleransinya, dan dengan beberapa parameter-parameter lainnya. Sehingga dengan hasil itu nanti pemerintah, ataupun termasuk di dalamnya *stakeholder*, bisa melakukan intervensi terhadap visa tadi yang saya sebut ataupun toleransi yang dimaksud.

Saya kira itu aja dulu dari kami. Terima kasih, Bu.

Saya sampaikan kembali kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Terima kasih Bapak Sabam Sinaga.

Bapak-Ibu Anggota Dewan,

Sebelum nanti kemeja Pimpinan, karena yang hadir banyak, jika dari Bapak-Ibu masih ada yang ingin menyampaikan pendapat masukan kami persilakan, tapi mohon 3 menit saja. Jadi begitu ‘*tit*’ berganti, ya.

Kami persilakan meja depan dulu, berikut, yang sudah Bapak sudah tadi?

Belum, ya Pak? Oh, baik Pak, nanti.

Baik, terima kasih.

Silakan, silakan Bapak Syarief Muhammad.

F-PKB (HABIB SYARIEF MUHAMMAD):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pimpinan.

Langsung *to the point* saja, Bapak Kepala BRIN, Ibu Kepala BPS.

Sampai hari ini pengaturan lembaga penelitian atau regulasinya masih banyak tumpang tindih. Nampaknya perlu ada satu pedoman tunggal berkaitan dengan riset ini.

Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ledia, berkaitan dengan pemetaan daerah. Nampaknya kita tidak bisa digeneralisir begitu saja, karena setiap daerah, sebagaimana disampaikan oleh Bu Ledia, memiliki kearifan lokal, memiliki spesifikasi, memiliki keunikan. Nah, sering di lapangan terjadi sedikit kontradiktif dengan Bappeda Litbang dan BRIDA, itu banyak kita temui di lapangan.

Kemudian yang ketiga, kita memahami keterbatasan dana riset itu menjadi salah satu faktor riset di Indonesia tertatih-tatih. Betul apa yang disampaikan oleh Ibu Ledia, malah kalau saya tidak salah masyarakat Malaysia sudah 1,26% dari PDB, Singapura 2,19%, Indonesia 0,03% dari PDB, dan trennya mengalami penurunan. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi dasar kebijakan tatkala menentukan anggaran ini. Apakah Banggar juga ikut berperan atau bagaimana, saya tidak tahu persis.

Kemudian yang keempat, format riset sementara ini sangat banyak. Adakalanya riset lebih banyak disibukkan ke persoalan yang sifatnya administratif daripada hal-hal yang bersifat substantif. Kalau tidak salah KPK tahun 2018 sempat mengangkat masalah, waktu itu mungkin belum ada BRIN, bahwa dana penelitian yang betul-betul terpakai untuk penelitian hanya 43,17%, yang lain untuk yang lain-lainnya. Nah oleh karena itu, pedoman tunggal riset nampaknya perlu dilahirkan oleh BRIN. Karena saya melihat BRIN ini memiliki peran yang sangat strategis dan akan menjadi lembaga induk untuk berbagai penelitian. Sementara tadi regulasinya sendiri masih tumpang tindih.

Dan yang terakhir, untuk BRIN mohon penjelasan berkaitan dengan proporsi antara riset yang bersifat *science* dan riset yang bersifat sosial. Tadi sudah secara sepintas sudah disampaikan, nah maaf mungkin agak sedikit jomplang, agak cukup jauh.

Kemudian ke BPS, kami sangat berharap banyak BPS ini. Karena untuk bisa mencari informasi yang akurat, ada kalanya saya harus menggunakan lembaga lain yang saya pakai sementara ini *We Are Social*, yang dari Inggris.

Karena BPS ya ada kalanya, maaf agak diragukan. Contoh misalnya berkaitan dengan kemiskinan. Kemiskinan, *World Bank* menentukan 3,2 US Dollar per kapita, per hari. Nah, BPS sementara ini masih menggunakan hitungan lama, 1,9 Dollar per kapita, per hari. Apakah karena takut orang Indonesia disebut terlalu banyak yang miskinnya? Yang lain-lain sudah sangat jauh.

Nah, kemudian juga misalnya pernah ada saya bingung antara data BPS dengan Kemendag, perbedaannya sampai tiga kali. Data BPS nilai impor 116 juta US, Kemendag, dari negara asal negara pengimpor itu 367 juta US, ini sampai tiga kali lipat ya, itu berkaitan dengan tujuh produk, tekstil, aksesoris, kemudian sandal, keramik, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini yang betul yang mana? Belum lagi data pegawai dan sebagainya, dan sebagainya. Kami berprinsip bahwa tanpa data yang tepat kebijakan tersebut hanya akan menjadi manipulasi statistik. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki, data akurat data aktual, dan data relevan itu yang betul-betul kita butuhkan.

Saya paham bahwa sejak 1997, Undang-Undang BPS ini sudah sangat kadaluarsa. Malah seorang peneliti mengatakan, mungkin hampir 35-40% klausul-klausul atau *pointers-pointers* yang ada pada Undang-Undang BPS nampaknya sudah harus mengalami revisi.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Waalaikumsalam.

Pak Habib, terima kasih. Lebih 4 menit dari ketentuan. Tapi nggak apa-apa, karena saya lihat di sana ada Verrel jadi agak menenangkan.

Pindah lagi Verrel, ke sana Verrel.

Iya, berikutnya Ibu Karmila, lalu dilanjutkan nanti langsung saja, tapi sekali lagi saya mohon izin 3 menit langsung ini berhenti ya Pak, ya. Kalau saya nggak tega, nggak tahu nih nanti Pak saya.

Iya, kami persilakan Pak Karmila, Ibu.

F-P. GOLKAR (Dr. Hj. KARMILA SARI, S.Kom., M.M.):

Terima kasih, Ibu Pimpinan.

Bapak Ibu Komisi X juga dari BRIN dan BPS. Saya 1 menit aja enggak usah lama-lama Pimpinan.

Pertama, untuk Kepala BRIN dan juga Plt. Kepala BPS. Ini sebenarnya kalau kita betul pahami sebenarnya *think tank* Indonesia tuh ada di sini, baik itu

pendataannya termasuk juga perencanaan. Kalau salah-salah ya kita pasti salah perencanaan salah keputusan.

Nah, tentunya yang pertama pada Kepala BRIN, Pak Dr. Laksamana, memang harus ada program kegiatan pemanfaatan riset. Nah, ini, ini hal yang paling kita sorot kadang riset kita seperti koleksi perpustakaan, Pak. Jadi, melihat daripada ini, kami ingin penyampaian dari Bapak seharusnya BRIN ini juga punya untuk pemanfaatan seperti KEK, kawasan strategis berarti kita ada upaya untuk peningkatan bagaimana kawasan ekonomi khusus itu juga ada penelitian dari BRIN. Karena ini juga nanti kaitannya sesuai dengan visi misi Presiden sekarang itu adalah kemandirian baik itu ketahanan dan energi. Nah, tentu termasuk juga kawasan ekonomi khusus. Nah, tentunya juga, ini juga kita tahu memang BRIN ini kumpulan lahan dan segala macam seolah semua peneliti di sini.

Nah, ini kami juga harapkan Pak, ada karena kita ini di Komisi X saat ini lagi ada peningkatannya bagaimana semuanya S3. Nah, otomatis kan kita juga bisa berkoordinasi dengan kampus-kampus. Begitu mahalnya jurnal dan lain-lain ini juga bisa menjadi solusi. Sehingga mereka akademisi ini menjadi bagian dari praktisi yang ada di dalam BRIN, termasuk juga yang di kampus, untuk berkolaborasi, sehingga ini memudahkan juga kita peningkatan daripada jurnal ataupun penelitian yang bisa benar-benar dimanfaatkan.

Untuk Plt. Kepala BPS, Ibu dari tadi teman-teman Komisi V bilang datanya, tapi memang Bu kalau kita.

Eh, Komisi V, Komisi X, ya. Kurang minum kayaknya saya.

Komisi X. Jadi, ini kemiskinan, memang setiap kali reses kami pasti ditanya begitu. Karena kenapa, dari Kemensos pun mencoba menggunakan aplikasi, tapi itu tidak memberikan solusi. Nah ini Bu, tentunya dengan dunia yang canggih, teknologi BPS ini adalah sebenarnya andalan di Indonesia. Ini kalau kita melihat data-data, contoh kemarin waktu saya masih di DPRD Provinsi, itu seperti BUMD kondisi *real*-nya BUMD itu ada enam, ada lima, tapi BPS itu selalu dari tahun ke tahun nggak *ter-update*. Kondisinya sekarang 5 tapi 6. Nah, ini yang harus diperhatikan, sementara data itu sudah dipublikasi. Nah, otomatis kan data tidak sesuai kondisi akan memberikan pengaruh yang kurang bagus untuk membuat keputusan. Nah, kita tahu pun juga BPS ini adalah data yang dianggap valid. Jadi, pemerintah tuh tahunya BPS saja. Nah, sementara BPS tidak *update* sesuai *real*.

Nah, ini yang kita maksudkan tadi di sini saya hitung ini, berapa sih jumlah pegawainya kurang lebih, saya tadi hitung rata-rata ini ya Bu ya, 76 orang. Nah, kalau di kabupaten/kota berapa sih, kurang lebih 26 orang. Ini bagaimana koordinasinya dengan dinas-dinas terkait? Nah, ini maksud kita supaya data yang Ibu beserta jajaran apa namanya *di-upload*, *di-publish*, ini benar-benar bisa *valid* kita pakai. Karena Bu, kalau dilihat setiap dinas itu mereka data untuk mencari informasi itu kecil sekali anggarannya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dana...

Eh lebih ya, Bu? Wah, saya nggak komitmen berarti ternyata.

Nah, maksud saya, nah saya minta tolong dari Plt. Kepala BPS apa nih saran daripada Ibu untuk inovasi karena kalau seperti ini terus jadi BPS ya begini-begini saja. Jadi, pun kita juga tidak bisa meng-*upgrade* kalau dananya ya 5,7, 5,8 triliun, ya hasilnya juga begini. Artinya bukan sesuatu yang bisa diandalkan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Walaikumsalam.

Terima kasih.

Berikutnya, Bapak Prof. Furtasan Ali Yusuf. Kami persilakan.

F-P. NASDEM (Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.):

Iya. Terima kasih, Ibu Pimpinan.

3 menit itu kan untuk satu anu ya Bu ya, satu sesi ini, berarti kan kalau ada BPS berarti 6 menit.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Lebih cepat, lebih baik.

F-P. NASDEM (Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati.

Bapak Ibu, sahabat-sahabat Komisi X yang saya hormati.

Bapak Kepala BRIN yang saya hormati.

Ibu Plt. BPS yang saya hormati.

Pertama Pak, saya Furtasan Ali Yusuf, Fraksi Nasdem, Banten II, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon.

Saya melihat BRIN ini kan satu lembaga baru ya Pak, saya lihat dari undang-undangnya masih baru sekali. Memang dalam sebuah perubahan organisasi itu pasti ada dua dampak yang saya baca. Dampak yang mungkin bagi sudut pandang orang lain menganggapnya itu baik, ada sudut pandang yang lain menganggapnya kurang baik. Tapi, dari sudut pandang yang kedua yang pertama juga mempunyai alasan masing-masing. Nah, saya melihat dari

peleburan, saya nyebutnya peleburan ya Pak ya, seluruh lembaga-lembaga penelitian yang ada *problem*-nya muncul luar biasa.

Saya baca Pak, saya kan seorang dosen Pak, jadi saya membaca sering merujuk kepada rujukan-rujukan yang dilakukan oleh BRIN ini. Itu *problem*-nya sampai hari ini saya melihat ini belum selesai. Ada yang dilihat dari sudut pandang *leadership*-nya kepemimpinannya, ada yang dilihat dari sudut penelitinya, ada infrastrukturnya, ada dari anggaran mungkin yang tidak ada *problem* ya kalau anggaran, karena itu adalah tergantung kesepakatan. Yang paling penting adalah saya sangat sedih ketika ada berita ini beberapa berita saya baca nih Pak, itu adalah hasil-hasil penelitian atau artefak-artefak yang ada itu, itu adalah kurang diperhatikan dengan baik soal pemindahannya misalnya. Bagi mereka kan sebetulnya tidak ngerti maksudnya benda apa itu. Bagi seorang peneliti yang sifatnya arkeolog mungkin itu sangat ngerti dan itu sangat berharga, kira-kira begitu.

Jadi, saya maksud saya gini Pak, bahwa BRIN memang satu bangsa yang besar ini wajiblah harus ada lembaga riset ini karena itu adalah sebagai pijakan. Praktek itu teorinya kan dari teori dulu kan, kira-kira begitu. Oleh karenanya, saya berharap ke depan ini benar-benar harus *wise* ya Pak ya, sehingga semuanya bisa dirangkul.

Kalau saya mengatakan sekarang mungkin terlambat ya, harusnya dari dulu BRIN itu tidak bisa konsepnya seperti yang sekarang. Jadi semuanya digabung jadi satu akhirnya yang lama hilang. Padahal kalau dulu ambil konsepnya adalah lembaga-lembaga yang sudah umurnya puluhan tahun itu adalah dibiarkan ada, kemudian ada *holding*-nya, ada intinya di situ, sesungguhnya adalah sebetulnya aman semuanya. Karena sudah punya tempatnya, sarananya, SDM-nya masing-masing, tinggal dikoordinasi saja semacam perusahaan *holding* kayak begitu, Pak. Itu sebenarnya saya ngomong agak terlambat sekarang, tapi sebenarnya nggak ada salurannya dulu saya ngomong.

Oke, Bu ya, baru satu ya.

Waduh saya ngomong apa lagi ini.

Jadi, grogi juga kalau ngomong. Tapi nggak apa-apa, poin pentingnya itu.

Yang keduanya adalah tadi Bapak mengatakan bahwa yang dilakukan oleh BRIN dengan perguruan tinggi adalah ada perbedaan. Kalau perguruan tinggi adalah riset berbasisnya akademik, tapi kalau riset ini adalah inovasi, ya kan begitu.

Tapi, sebelumnya ujungnya sama Pak, bedanya hanya metodologi mungkin harus kita perkuat di situ. Tapi ini juga ada aspirasi dari masyarakat atau terutama masyarakat perguruan tinggi, ada sedikit ya terlalu birokrasi katanya kalau melibatkan teman-teman di perguruan tinggi. Artinya, dari sisi yang juga berbeda. Kalau di Kementerian itu kan gelondongan gitu kira-kira,

anggaran sekian, silakan proposal di buat. Kalau di sini kaya birokrasi betul, tanda tangan sebentar, tanda tangan sebentar, ini nih ongkosnya, kira-kira begitu.

Nah, ke depan saya kira bisa juga di contoh *best practice*-nya dari Kementerian Pendidikan, yang penting proposalnya masuk, dievaluasi, *reviewer*-nya bagus, kasihlah anggarannya, tinggal termin aja kira-kira gitu turunnya.

Mungkin langsung saya ke Ibu, ya Bu ya. Statistik ya Bu ya, karena waktunya terbatas. Ibu Plt. punten langsung dijawab, sudah berapa lama Bu, Plt-nya?

Plt. KEPALA BPS (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Hampir 1,5 tahun, Bapak.

F-P. NASDEM (Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.):

1,5 tahun ya Bu, ya.

Kata orang Serang *mah*, Plt. itu artinya pejabat begitu, *lillahita'ala* atau pejabat *langka tunjangane, jare wong* Serang. Tapi saya kira fungsinya tetap ya Bu ya, ada ya gitu.

Oke, saya masuk ke statistik. Tadi Ibu mengatakan undang-undang ya Bu ya, dorong Bu kita bareng-bareng untuk bisa menjawab ini, itu satu.

Yang kedua, betul juga Bu soal statistik ini. Data ini sampai hari ini belum dijadikan rujukan utama bagi kita semuanya, belum. Ini tantangan sendiri ya Bu. Artinya apa yang harus kita perbaiki? Mungkin metodologinya, caranya. Kalau sensusnya sudah benar, tidak ada yang tertinggal itu baru benar. Cuma sepakat sekali dengan teman-teman yang tadi, harus benar-benar dirinci bisa nggak? Supaya data ini valid, kredibel, dan bisa dipercaya. Apalagi kemarin ada Pak Presiden mengatakan, jangan percaya data-data statistik. Nah, mungkin sebagai orang statistik kesinggung kali itu kira-kira. Tapi sebenarnya itu adalah pemacu saja, bahwa Ibu-Bapak harus bekerja sesuai dengan *rule*-nya, kira-kira begitu.

Nah, kemudian saya lihat juga ada beberapa kegiatan di lapangan, saya hampir setiap bulan dapat kuisisioner Bu, masih bentuknya manual sampai hari ini. Kita sudah zaman digitalisasi ini. Nah, sehingga itu harus dirubah dalam bentuk IT lah, saya kira begitu.

Baik, Bu saya patuh.
Terima kasih.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Berikutnya, Bapak Muhammad Iqbal. Kami persilakan, ini ahli pantun.

Bapak boleh buka dengan pantun dulu, Pak.

F-PKS (Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI):

*Bila ingin melihat ikan di dalam kolam,
Tenangkan dulu airnya sebening kaca,
Siapa yang ikhlas dan tulus menjawab salam,
Hidupnya selamat bertabur berkah.*

Sudah ada belum, Pak? Hasil penelitian itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Ibu Pimpinan Sidang yang kami hormati.

Kemudian pimpinan Komisi X DPR RI.

Kemudian mitra kami dari BRIN, Bapak Dr Laksana Tri Handoko dan seluruh jajarannya.

Kemudian Ibu Amalia Adininggar, dari BPS, Plt. Kepala beserta jajarannya yang saya hormati.

Rekan-rekan Komisi X yang saya hormati.

Ada tiga unsur yang sangat penting dalam upaya kita untuk meningkatkan keberlanjutan dari sebuah lembaga termasuk riset dan juga dalamnya BPS.

Pertama, kebijakan dan anggaran yang tepat. Kepada BRIN, kami mohon informasi, sejak berdirinya sampai saat ini, apakah anggaran BRIN ini meningkat atau menurun? Kalau menurun kenapa sampai menurun? Ini penting jawaban kita. Kalau meningkat, *alhamdulillah*. Kalau anggaran kurang banyak hal yang tidak bisa diurus.

Saya melihat di halaman 29 ya, tantangan dan peluang anggaran riset yang masih rendah serta pemanfaatannya belum dikelola dengan baik, ya. Ini salah satu apa hal. Tetapi saya melihat dan memperhatikan dari BRIN tidak ada upaya umpamanya untuk merekomendasikan, kami mohon dengan hormat penuh perhatian kiranya Komisi X dapat menambah anggaran ini. Jadi ternyata puas dengan anggaran yang 5,8T itu.

Hadirin yang dimuliakan *Allah subhanahu wata'ala*,

Atau mungkin program-programnya dinilai mungkin oleh Bappenas atau Menteri Keuangan yang tidak menggigit, itu juga bisa menjadi kendala. Oleh karena itu, prinsipnya adalah:

*ada garam ada bawang,
garam berasal dari Madura
ada program ada uang,
program berhasil rakyat sejahtera*

Apakah hasil dari program-program riset itu memberikan tingkat kesejahteraan bagi masyarakat? Ini hal yang perlu kami sampaikan terkait kebijakan dan anggaran yang tepat.

Yang kedua, implementasi yang konkret dan manfaat. Apakah dari implementasi kebijakan-kebijakan dan anggaran itu tepat sasarannya? Karena tidak ada gunanya sebuah kebijakan yang tidak melahirkan kebijakan. Dikatakan kebijakan dia melahirkan kebijakan-kebijakan dan bermanfaat luas untuk itu. Ini standar yang perlu kita perhatikan ke depan, sehingga BRIN atau dan juga BPS ini betul-betul menjadi andalan dan patut untuk dipertahankan dan ditingkatkan.

Kemudian, yang ketiga, kelembagaan yang tangguh dan kuat, semuanya ujungnya wat-wat semua Pak ya. Kenapa? Membudayakan riset dan inovasi di setiap sendi kehidupan ini menjadi kunci untuk mengatasi persoalan yang ada. Jadi, kehadiran BRIN adalah hadir untuk menyelesaikan persoalan, bukan menambah persoalan. Untuk itu, kami berharap seyogyanya BRIN ini menjadi aktor utama dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan riset dan inovasi nasional dari lembaga-lembaga riset yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Pertanyaan kami, apakah BRIN telah melakukan itu, sehingga terjadi harmonisasi satu dengan yang lainnya, tidak bertumpang tindih atau yang muncul ke permukaan lah ego-ego sektoral? Ini perlu dibina, sehingga dia menjadi memiliki daya rangkul, kemudian daya rekat bagi lembaga lias yang lainnya. Apakah BRIN telah melakukan upaya untuk itu?

Bapak Ibu yang saya hormati.

Masih ada waktu Bu, ya.

Karena itu kami menyarankan seperti suara pantun berikut ini:

*Rembulan menghias malam yang cerah,
Saat yang baik menilai diri
Berjalan seiring sama arah,
Banyak manfaat yang dapat diraih*

Tapi kalau satu kebijakan lembaga yang lainnya bertentangan, nanti tidak banyak yang bisa diharapkan, cuma kita ngurus pertikaian diantara lembaga ini.

Kemudian ke para pendatang baru, juga Ibu juga tidak ada usulan untuk penambahan anggaran atau apa masalah yang kami hadapi kepada Komisi VIII. Jadi kami sangat senang sekali dengan itu dan kalau ada kami juga harus berjuang ya, eh maaf-maaf ya, Komisi X, maaf. Ini ada pantunnya.

*Kasih berlabuh cinta bertambat,
Dada lapang menenangkan hati,
Komisi X ramah bersahabat,
Siapa yang datang diterima dan dihormati.*

Ya, tapi ada catatannya Bu.

*Bagaimana gendang berdendang,
Begitu pula tarian bergoyang.*

Barangkali paham maksudnya.

Saya rasa Ibu...

*Kawah telungkup bukit terbis,
Pohon putat penyangga alam,
Sudah cukup waktunya habis,
Mohon maaf berakhir kalam.*

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Memang Bapak Iqbal ini selalu memberikan suasana yang berbeda karena pantun-pantunnya.

Berikutnya, Mas Denny Cagur.

F-PDI PERJUANGAN (DENNY CAGUR, S.Pd.):

Keluarin pantun.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Boleh berpantun Mas Denny, tapi jangan pakai Bahasa Sunda. Nggak bisa soalnya.

F-PDI PERJUANGAN (DENNY CAGUR, S.Pd.):

*Elvy Sukaesih pergi ke Minang,
Terima kasih Pimpinan.*

Baik.

**Yang kami hormati Pimpinan juga teman-teman di Komisi X.
Kepala BRIN Kepala BPS, dan seluruh jajaran yang kami hormati.**

Mengacu pada paparan yang disampaikan oleh BPS di halaman 6 tentang sensus pertanian dan halaman 13 tentang program kerja 2024. Di sini terlihat ada salah satu program kerja BPS tahun 2024 yaitu sensus pertanian

2023. Di mana salah satu manfaatnya adalah tersedianya data sensus pertanian untuk menjawab isu strategis di sektor pertanian. Nah, terkait isu yang sangat kuat di bidang pertanian yaitu masalah pupuk distribusi pupuk untuk para petani.

Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam pelaksanaan sensus pertanian masalah pupuk ini termasuk ke dalam kajian data karakteristik pokok, sehingga ada risetnya tentang jumlah produksi penyebaran dan segala hal tentang pupuk? Karena kenapa, mengacu dari yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu 3 sampai 4 tahun mendatang. Saya yakin data dari BPS terkait seluruh aspek pertanian termasuk pupuk ini penting bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi.

Cukup sekian, Pimpinan. Kalau ada waktu yang sisa saya *infaqkan* buat yang lain. Jadi, pertanyaannya, pertanyaannya singkat saja, karena bagi saya lebih baik cepat daripada dekat lama tapi nggak jadian.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Terima kasih.

Saya sampaikan kepada meja pimpinan, Bapak Ibu, Bu Himma, Pak Lalu, untuk mungkin ada beberapa hal sebelum nanti kita akan meminta tanggapan. Tapi tanggapannya nanti singkat saja.

Silakan, Pak Lalu.

Iya, tidak saya menit.

F-PKB (H. LALU HADRIAN IRFANI, S.T.):

Terima kasih, Bu Esti.

Saya kurang dari 3 menit ini, Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pak Kepala BRIN, Pak Dr. Laksana.
Bu Plt. Kepala BPS yang saya hormati beserta seluruh jajaran.
Pimpinan dan anggota Komisi X yang saya hormati.**

Saya singkat. Pertama terkait dengan BRIN. Perlu Pak Kepala BRIN menjelaskan sekaligus mempertegas, hari ini kami di Pimpinan dan mungkin teman-teman anggota banyak menerima WA dari peneliti-peneliti kita di masing-masing *homebase* mereka. Ada informasi bahwa mereka akan ditarik ke Cibinong semua. Nah, ini mohon Pak Kepala BRIN untuk mempertegas apakah itu benar atau baru sekedar wacana.

Yang kedua, terkait dengan dengan tupoksi, Pak. Ini perlu kami dipertegas lagi antara BRIN dan Kemendiktisainstek. Ini di beberapa kesempatan juga Pak Prof. Satrio mengatakan bahwa BRIN itu tidak perlu. Nah, ini tentu harus dijawab untuk memberikan kepada masyarakat kita informasi yang pas terkait dengan ini. Jadi, jangan sampai kesannya antara Kemendiktisainstek dan BRIN itu ada persoalan. Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga saya ke BPS, Bu. Di BPS ini kan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 sudah dijelaskan bahwa sensus penduduk itu minimal dilaksanakan sekali dalam 10 tahun. Tadi, Bu Ledia sampaikan kalau 10 tahun itu kan datanya sudah agak kurang valid lah dengan situasi kita hari ini. Nah, DPR sudah mulai membahas terkait dengan RUU Statistik. Apakah di dalam RUU itu, ini saya tanya ke BPS walaupun itu adalah inisiatif dari DPR RUU tersebut. Apakah di dalam naskah akademiknya, ada nggak diusulkan untuk merubah tenor waktu dalam rangka sensus itu tidak 10 tahun lagi, misalnya 5 tahun atau 3 tahun? Nah, ini dalam rangka apa, untuk meng-*update* data kependudukan kita, sehingga tadi benar yang disampaikan oleh teman-teman anggota Komisi, jangan sampai, oleh Bang Andi tadi, 5 tahun sekali ini kita ribut urusan DPT. Ini setiap pemilu kita selalu ribet urusan DPT karena perbedaan jumlah data kependudukan kita.

Kemudian yang kedua, kemarin di beberapa kesempatan Menko Pemberdayaan Masyarakat pada saat beliau rapat dengan Menteri Sosial, ada kesepakatan untuk adanya data tunggal, Bu. Nah, hari ini kita tahu BPS mengeluarkan data, Kementerian Sosial mengeluarkan data, begitu juga kementerian-kementerian lain, nah sehingga banyak data yang dipakai. Nah, kita membutuhkan kepastian data mana sebenarnya yang digunakan? Apakah data dari BPS atau data dari kementerian-kementerian yang notabene misalnya program mereka ada di kementerian yang bersangkutan? Nah, ini mohon penjelasan kiranya Bu Plt. Kepala BPS.

Mungkin itu, Bu Esti.

Terima kasih.

*Wallahulmuafiq ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Walaikumsalam.

Silakan Ibu Himma.

F-P. GERINDRA (Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih, Bu Esti.

Pimpinan sidang dan semua anggota Komisi X yang saya hormati.

Kepala BRIN Bapak Dr. Laksana Tri Handoko.

Saya suka kebelibet laksamana Pak. Ya, jadi Dr. Laksana Tri Handoko. Kemarin kita sudah jumpa.

Dan juga Ibu dari BPS RI, Ibu Amalia yang saya hormati.

Saya kemarin berbincang dengan Bapak Laksana, Kepala BRIN, bahwa ada jumlah yang disebutkan yang sebetulnya belum koordinasi tentang kuota penerimaan dari CPNS yang ada di BRIN. Saya tidak mau nyebut angkanya karena nanti katanya masih belum terkonfirmasi dengan baik. Jadi, saya hanya ingin meminta penjelasan. Ketika dibuka pelamarnya kalau CPNS kementerian lain atau lembaga lain itu membludak di berbagai instansi, rasio formasi dengan jumlah pelamar biasanya puluhan sampai ratusan kali lipat. Nah, tapi di BRIN ini unik juga, lowongan CPNS terbaru untuk formasi peneliti yang tersedia tapi pelamarnya tidak mencapai kuota. Nah, ini apa penyebabnya? Apakah karena persoalan koordinasi terlalu tinggi untuk syarat pelamar atau persoalan kepastian kesejahteraan peneliti? Sehingga mereka yang punya kualifikasi enggan jadi peneliti di Indonesia karena mungkin, ya itu tadi, kepastian kesejahteraannya.

Kemudian, ada yang tadi sudah disampaikan sebagian oleh Pak Lalu tentang seperti ada ketidakharmonisan ya Pak antara lembaga riset yang lain dengan BRIN begitu. Jadi, bagaimana caranya lah mengharmonisasikan sehingga lebih enak kita sebagai sesama lembaga bekerja dengan baik karena masing-masing bekerja juga untuk negara, untuk penelitian. Jadi, ini perlu ada harmonisasi juga sinkronisasi antar lembaga.

Kemudian, ada isu yang soal penelitian harus ke daerah harus ke pusat, meskipun Bapak sebagai atau lembaga BRIN sudah memberikan opsi bahwa boleh memilih begitu ya, mau terpusat atau ataupun tetap di daerah. Tapi ada usulan Pak dari masyarakat, khususnya masyarakat peneliti, bahwa mereka diberi kesempatan sampai Januari 2025, karena mereka tidak bisa serta merta pindah rumah, mereka harus menyesuaikan beradaptasi memindahkan keluarganya jika mereka memilih opsi ke pusat.

Kemudian juga ada usulan untuk peneliti yang khusus padi, karena kita terkait akan swasembada beras, untuk peneliti yang khusus padi itu mereka minta diperbantukan kerja untuk swasembada pangan. Jadi, mungkin *stay* di tempat yang itu karena untuk swasembada pangan. Jadi, mungkin dipisahkan antara peneliti yang khusus padi, Pak.

Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sebenarnya banyak tapi saya cicil-cicil lah ya. Jadi, nanti kita ada lagi hal yang akan disampaikan kepada BRIN. Saya juga meng*infaqkan* waktu saya kepada Bu Esti.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Soalnya nggak bunyi.

F-P. GERINDRA (Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si.):

Nggak bunyi.

Terima kasih Bu Esti.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Terima kasih Ibu Himma.

Dan sebelum Bapak, baik dari BRIN maupun dari BPS untuk menyampaikan tanggapannya. Izin, saya menyampaikan menggunakan sedikit waktu untuk bisa menyampaikan beberapa hal.

Yang pertama, bahwa benar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, itu kita sangat berharap mengapa undang-undang itu dibuat adalah untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional dan memenuhi hak asasi setiap orang dalam memperoleh manfaat ilmu pengetahuan teknologi dan berikutnya juga menjadi daya dukung di dalam perumusan kebijakan pembangunan. Itu sekilas di dalam konsiderannya.

Dan kemudian juga di dalam Pasal 48, ini saya pertegas untuk menyampaikan bahwa undang-undang kita memang mengamankan adanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Di dalam Pasal 48 dinyatakan bahwa untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud, invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kami mengetahui bahwa kemarin sempat muncul upaya *judicial review* di dalam Mahkamah Konstitusi terkait dengan kata terintegrasi. Tetapi oleh Mahkamah Konstitusi, ini supaya kita ketahui Komisi X, bahwa upaya untuk mengganti kata integrasi itu tidak diterima. Sehingga kata integrasi itu tetap ada di dalam Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dan berikutnya, kita juga mengetahui bahwa di dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud ini saya sampaikan supaya kita punya fondasi yang jelas, berkeyakinan bahwa dibentuknya BRIN ini memang diharapkan ada hal yang memang harus kita perjuangkan bersama melalui BRIN. Yang dimaksud dengan terintegrasi adalah upaya mengarahkan dan menyinergikan antara lain dalam penyusunan perencanaan program anggaran dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang penelitian, pengembangan, pengajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.

Nah, dengan pasal dan kemudian juga dengan penjelasan pasal, kita bisa memahami bahwa peran BRIN ini luar biasa. Kita melihat pada tahun 2021 sampai 2024 ada pemanfaatan hasil riset dan inovasi kepada masyarakat di 24 provinsi, 415 kabupaten/kota. Ini data yang Bapak sampaikan tadi, dengan sekian banyak kegiatan. Nah, tentu kita punya harapan bahwa BRIN ini karena juga sedikit ada polemik di media.

Nah, saya kira ini memang perlu ada konsolidasi di internal pemerintah. Tetapi kita sangat berharap BRIN ini tetap bisa eksis dengan kinerja yang sudah ada selama ini dengan tetap kemudian bisa melaksanakan tugasannya sesuai dengan undang-undangnya. Bahwa tadi ada ketentuan bahwa bidang apa dilakukan oleh Diktisaintek, bahwa kemudian juga di sini ada BRIN, saya kira itu bukan di dalam rangka untuk kemudian, "*Oh, BRIN harus masuk menjadi di bawah Sainstek Dikti*". Tetapi hal-hal yang memang harus dikomunikasikan sebagai bentuk kebijakan di pemerintahan ini, peran sertanya di dalam rangka menyusun riset-riset sebagai bagian dari membuat pijakan untuk menyusun program, saya kira program kebijakan, saya kira ini peran yang memang harus kita kuatkan, Bapak. Hanya bagaimana kami menyampaikan, bagaimana kemudian ini bisa dikonsolidasikan dengan peran yang memang, Bapak tidak perlu menghindar kok, saya kira menurut saya ketika ada pihak-pihak yang menanyakan. Justru bagaimana kita tunjukkan BRIN ini punya peran. Kalau masih ada kekurangan kita evaluasi, tetapi kemudian apa yang mesti kita lakukan untuk penguatan BRIN yang memang itu adalah amanat dari undang-undang.

Undang-undangnya butuh PR yang tentang peta jalan. Nah, saya kira itu juga penting, Pak. Tetapi bukan berarti saya termasuk yang tidak *sreg* ketika anggarannya naik, tapi peta jalannya jadi dulu. Saya membayangkan peta jalan pendidikan kita itu jadinya 10 tahun loh, Bu. Ketika menyusun peta jalan pendidikan lebih dari 10 tahun itu sejak awal saya masuk di Komisi X periode pertama, ini periode ketiga saya. Sejak awal ketika kita kejar untuk segera menyusun Undang-Undang Sisdiknas jawabannya menyusun untuk mengubah, jawabannya adalah kemudian kita tunggu dulu tentang peta jalan pendidikan.

Nah, ini yang kemudian perlu kita diskusikan, berapa lama kemampuan untuk menyusun peta jalan riset kita ini? Karena ini tidak hanya bergantung kepada BRIN, karena ini menyangkut dengan berbagai lembaga yang lain. Nah, ini yang segera perlu kita pikirkan. Saya sepakat bahwa peta jalan harus segera kemudian menjadi konsentrasi di dalam penyusunan di dalam bicara soal riset ini.

Kemudian berikutnya, Ibu saya berterima kasih hari ini bisa bertemu. Saya dulu kesulitan Bu untuk mencari data. Saya tidak tahu. Saya sejak di DPRD DIY berusaha selalu saya orang yang atau, kami adalah berharap ketika mengusulkan sesuatu, menyusun kebijakan, itu *by data*, bukan *by katanya*, *by data*. Tetapi ada kesulitan kami Bu untuk mencari data di BPS. Mungkin Ibu bisa membuka kepada kami, bagaimana cara kami untuk bisa mendapatkan data. Dulu ketika kami secara personal, waktu masih sudah DPR RI dengan kop DPR RI, nggak mau, harus secara kelembagaan. Jadi, BPS di Jogja minta mungkin mereka sudah lupa bahwa saya pernah minta data itu.

BPS di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di Jalan Kabupaten, waktu itu menyampaikan bahwa membutuhkan surat dari lembaga. Nah, apakah seperti itu? Atau memang ada data-data yang tidak boleh terbuka, yang hanya boleh dimiliki oleh instansi tertentu? Nah, ini yang saya kira kami juga

perlu penjelasan supaya nanti ketika butuh, misalnya kami butuh, “Bu pastinya angka putus sekolah”, kan ada tuh di hasil, hasil dari sensus ada nggak ya angka putus sekolah, ada kan, Bu? Angka putus sekolah sebarannya di mana? Ketika kita bicara sebarannya di mana sebenarnya itu korelasinya ke mana? Korelasinya adalah apa yang mau kami perbuat, kita perbuat untuk wilayah yang memang angka putus sekolahnya tinggi, yang masih di sana banyak buta huruf, atau di sana yang banyak janda-janda muda yang kemudian ditinggalkan oleh suaminya harus hidup secara mandiri. Mungkin kan ada hal-hal seperti itu. Itu yang pertama.

Yang kedua terkait dengan Reksosek, registrasi sosial ekonomi, yang tadi sudah disampaikan. Reksosek itu apakah bagian dari hasil yang dilakukan survei oleh BPS? Kalau i,ya tadi Pak Lalu sudah menanyakan, bagaimana kaitannya dengan DTKS? DTKS ada payung hukumnya. Ketika mendapatkan bansos dari Kementerian Sosial itu pegangannya adalah DTKS, itu ada payung hukumnya. Nah, sekarang ketika kemudian Reksosek itu akan dijadikan dasar, itu ada dituangkan di dalam rencana kerja pemerintah. Setiap RK, di dalam RKP berulang kali menyebut Reksosek itu kaitannya dengan bansos. Bansos itu kan tidak hanya di Kementerian Sosial, tetapi termasuk pendidikan. Ini kan ada bagian dari bansos yaitu misalnya PIP, itu juga bansos atau hal lain.

Nah, kami ingin mengetahui sejauh mana kerja sama antar kementerian? Siapakah kemudian yang menggunakan data dari Ibu? Karena berbeda-beda namanya, Bu. Jadi, kalau kita menggunakan Reksosek, “Oh nama yang ini enggak ada, nama yang di sini ada di Reksosek”. Tapi begitu kita menggunakan data DTKS ini sudah berbeda lagi.

Kita hanya ingin berharap bahwa kita harus ketika bicara satu data, ya itulah data yang bisa kita yakini kebenarannya. Yang kalau kemudian memang harus dibutuhkan, “Oh, DTKS diganti nih dengan Reksosek”, ya itulah yang mesti kita lakukan. Tetapi memang muatan-muatan yang diminta oleh Kementerian Sosial tentang batasan-batasan yang memang itu sangat dibutuhkan harus menjadi satu data yang memang dimiliki atau diambil dari data-data yang dilakukan oleh BPS.

Demikian, Bapak-Ibu. Dan kami berharap kita minta tanggapan ini sudah lewat. Saya perpanjang dulu 10 menit atau sampai 16.30 ya, Bapak-Ibu. Bapak Ibu boleh memberikan tanggapan tidak perlu satu-satu, kalau satu-satu satu pertanyaan satu orang Ibu Bapak jawab 5, nanti jam 09.00 malam belum selesai. Jadi, kalau satu pertanyaan 5 menit dari setiap anggota.

Yang terpenting adalah tanggapan sekilas saja, karena ini baru pertemuan pertama, Pak. Kita akan bangun pertemuan berikutnya yang lebih indah Pak. Ya, pertemuan pertama itu kan baru kenalan gitu kan, tahu sedikit-sedikit begitu. Pertemuan kedua berikutnya, itu sudah semakin. Begitu, Verrel?

Iya, jadi begitu Ibu Bapak, kami persilakan terlebih dahulu dari Bapak Dr. Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN untuk bisa memberikan sedikit tanggapan. Berikut juga dari Ibu kemudian Ibu Amalia. Kami persilakan.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Terima kasih Bu Pimpinan.

Mohon izin Bapak-Ibu Pimpinan dan Komisi X yang kami hormati untuk sedikit memberikan tanggapan. Tapi secara keseluruhan ya Bapak-Ibu, karena sudah saya rangkum pertanyaannya. Semoga bisa menjawab sebagai awal untuk diskusi berikutnya nanti.

Jadi pertama perlu saya sampaikan, tadi sebenarnya sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Ibu Esti terkait dengan filosofi awal pembentukan BRIN. Nah, kami akan melengkapi dari sisi teknis. Jadi, sebenarnya upaya pembentukan BRIN itu kalau dari sisi filosofis dari 2017 Bapak-Ibu, dari sebelum Presiden Jokowi 1, tapi sebenarnya dari sisi teknis kami sudah dari 2013. Jadi, karena apa, karena memang kami mengalami *problem* yang sangat mendasar terkait *critical mass* dari sumber daya riset inovasi yang tidak pernah tercukupi. Jadi, baik saya dulu di LIPI, LIPI yang paling besar sekalipun pada saat itu, itu sama sekali tidak sanggup untuk mengurus dirinya sendiri, sehingga boro-boro kami diharapkan untuk memfasilitasi orang lain. Jadi, itulah yang kemudian semuanya gabungkan.

Kami juga melihat *best practices* jadi yang pertama, eh, terakhir di dunia yang melakukan itu sebenarnya di UK, di Inggris itu ada UKRI (*UK Research and Innovation*), itu sekarang jadi satu tetapi isinya masih 9, yang lama itu 9 masih ada. Nah, itu mereka tetap mengalami *problem* yang sama. Itu sebabnya, pada saat itu kami dari tim teknis tidak merekomendasikan itu. Jadi, kalau mau digabung harus gabung betul-betul di *blended*, sehingga seluruh sumber daya itu langsung menjadi satu. Kalau tidak, nanti di dalamnya masih kececeran ke mana-mana semua memegang sendiri.

Jadi, dulu kami begitu sulit teman BPT ke LIPI, teman LIPI ke BPT, itu sulit sekali untuk sekedar memakai alat misalnya, padahal sama-sama nggak punya lengkap. Nah, sekarang kita bisa membeli hampir semua, tidak ada yang kita tidak bisa beli. Jadi, kalau ada orang bilang infrastruktur riset kita tidak ada, teman di kampus siapa pun, saya minta ke saya karena kita *insyaallah* bisa beli.

Justru kita sekarang kesulitan menciptakan orang yang mampu mengoperasikan itu dengan baik dan benar. Jadi SDM-nya sekarang jadi *problem*, bukan lagi infrastruktur, bukan lagi anggaran karena anggaran pun sudah kami jadikan satu. Dan pada saat awal dengan Bapak Presiden Jokowi pada saat itu saya ingat betul, saya mau lihat dulu unit *cost* riset kita itu sebenarnya perlu berapa. Karena sebenarnya pada saat itu, Pak Jokowi di rapat kabinet pertama di tanggal 30 April 2021 itu sudah memerintahkan ke Bu Sri Mulyani dan seluruh itu Paripurna, saya ingat betul 26T harus di alihkan ke BRIN. Pada saat itu 26T Bapak-Ibu, anggaran riset yang sudah dicek bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kami pada saat itu tim transisi kami 26T. Tapi pada saat itu saya sampaikan kalau 26T saya malah takut teman-teman saya nanti ada *moral hazard*, karena saya tidak tahu sebenarnya kapasitas untuk memanfaatkan anggaran itu berapa.

Jadi, sekedar gambaran, bisa dibayangkan dari RK-K/L yang kami waktu itu berbasis data, berbasis dokumen, satu kebijakan, kemudian kebijakan pada saat itu di hampir semua K/L rata-rata 5 miliar. Saat ini Deputi Kebijakan kami itu 100 kebijakan itu 5 miliar. Jadi, unit *cost* itu begitu berbeda karena jujur saja dulu banyak dipakai untuk FGD, untuk perjalanan, dan seterusnya. Sedangkan saat ini kami sudah melakukan perubahan tata kelola yang sangat fundamental.

Jadi, pada saat awal saya memang sudah disampaikan oleh Pak Presiden dan Pak Pratik waktu itu saya ingat betul, "Mas, jangan bikin ramai-ramai", tapi saya sampaikan saya tidak mungkin bikin, jangan bikin riya'. Saya tidak akan bikin riya', ini pasti bikin ombak. Karena saya orang lama di komunitas ini saya tahu persis bagaimana kami selama ini mengelola. Dan kalau kita tidak mengubah tata kelola ini secara fundamental kita tidak akan memperbaiki masalah.

Jadi, sebenarnya tadi seperti kami sudah laporkan kalau proses integrasi dan kami sampai melakukan WTP, tata kelola aset, penggabungan sedemikian besar yang baru pertama kali dalam sejarah republik ini itu selesai dalam 2 tahun di 2022. Tetapi kalau masih ada riya' itu sebenarnya adalah efek dari perubahan tata kelola yang kami lakukan bersama-sama di BRIN. Jadi, kami melakukan total perubahan tata kelola bahwa saya harus akui tata kelola kami dulu tidak benar, termasuk sebenarnya di kampus, mohon maaf sekali. Jadi, itu tidak benar kalau di kampus boleh gelondongan itu salah satu yang salah dan saya pastikan itu menjadi temuan BPK RI. Jadi, dan itu sudah terjadi untuk kasus dana LPDP yang dialirkan ke kampus. Jadi, hal-hal seperti itu kebiasaan lama seperti itu dulu, jujur Bapak-Ibu, periset itu gajinya kecil, sehingga dia mencari uang dari proyek riset.

Kami saat ini tidak mengenal adanya proyek riset. Jadi, sesimpel itu tidak ada di BRIN itu namanya proyek riset. Semua difasilitasi bisa riset tapi tidak ada proyeknya. Dia tidak perlu punya proyek, dia tidak perlu pegang uang *cash* karena *best practices* diluar negeri memang harus seperti itu. Tidak boleh periset itu pegang uang *cash*. Dan kementerian keuangan juga memang seperti itu ketentuannya. Kalau selama ini terjadi yang berbeda itu masalah yang lain.

Tentu saya tidak bisa menyampaikan ini di media, itu sebabnya saya tidak merespons apapun permintaan media. Saya dari 2 tahun pertama saya media *darling*, yang jelek tapi bukan yang baik. Tetapi akhirnya saya diminta untuk jangan direspon, karena dan saya merasa itu akan membuka aib komunitas kami. Jadi, kami dan itu keluarga saya, jadi saya tidak bisa melakukan itu. Jadi, ya sudah biarkan dulu karena sebenarnya yang kita lakukan adalah perbaikan tata kelola, termasuk pembinaan *home base*.

Jadi sebenarnya pada saat awal integrasi ke BRIN kami menerima hampir sebanyak 4.000 periset dari berbagai Balitbang kementerian dan lembaga yang lain, diluar yang lima entitas besar. Nah, mereka masuk ke BRIN itu selama mereka menandatangani surat pernyataan. Saya wajib menerima tanpa seleksi, tidak boleh diseleksi dan saya memang tidak ingin melakukan

seleksi. Kami tidak melakukan seleksi sama sekali, semua kami terima. Tetapi pada saat itu memang kami memutuskan untuk tidak langsung meminta mereka pindah ke pusat risetnya. Karena kalau mereka langsung pindah ke pusat risetnya lab kami itu akan langsung hancur, karena lab ini kapasitasnya belum kami sesuaikan.

Itu sebabnya sejak awal kami dan pada saat itu masih *covid*, jadi masih *covid*. Sehingga tadi yang 26T itu akhirnya saya sampaikan dan saya kembali lagi yang ke 26T, 26T itu akhirnya saya sampaikan sudahlah ini kan *covid* juga perlu uang, jadi silakan dipakai saya tetap saja dengan anggaran dari 5 entitas. Sebenarnya belanja litbang kita tidak 6T, tapi hampir 15 karena kami minta pada saat itu ada penambahan dana abadi setiap tahun 5T, dana abadi penelitian, mohon maaf. Selain yang tetap di BOPTN itu ada sekitar 1,4T, saya kurang tahu sekarang, mustinya masih tetap ya, Bu. Kemudian ada di Kemenag, total-total itu hampir 15T. Jadi, sebenarnya belanja litbang kita itu 15T secara nasional sampai saat ini. Di BRIN saja yang sekitar 6T dan seterusnya. Memang di 2024 kami menurun karena di 2024 kami menghentikan pembelian infrastruktur yang memerlukan *multi years* sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden untuk tidak meng-*carry over* meninggalkan warisan ke pemerintahan berikutnya. Jadi, inisiatif baru kami hentikan semua pada saat itu dan kami akan masukkan *insyaallah* di 2025 mendatang.

Nah, kembali ke *home base* tadi. Jadi ini salah satu upaya kami. Jadi saya sebagai pimpinan lembaga dan mereka sebagai ASN, sesuai dengan ketentuan di ASN, kalau saya meminta mereka pindah, mereka harus pindah, pindah atau keluar, tidak ada yang lain sebenarnya, sama seperti tentara. Tetapi pada saat itu kami putuskan untuk membuat sistem WFA (*work from anywhere*). Nah, itu sesuai dengan persetujuan di Menpan juga dan sebagainya dan itulah yang kami pakai sebagai alternatif transisi untuk memberikan kesempatan kepada para periset ini untuk memikirkan kembali, memikirkan kembali sampai akhir 2024, Ibu. Oh, itu sejak mereka masuk, ada yang 2021 Agustus, yang terakhir itu Agustus 2022 yang teman-teman Kementan dan Kemenperin.

Jadi, pada mereka kita buka kebebasan untuk masuk ke BRIDA, karena BRIDA juga dalam proses pembentukan dan pasti membutuhkan teman-teman periset ini. Atau dia kembali ke K/L asalnya kalau memang dia merasa, "Oh saya nggak cocok, ternyata saya lebih baik K/L asal", karena misalnya untuk kebudayaan kami itu hanya meng-*carry over* tugas (tugas dan fungsi) terkait riset apa arkeologi bukan pelestari budayanya. Pelestari budaya itu masih adadi Dirjen Kebudayaan pada saat itu Mas Hilmar atau sekarang di Pak Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan misalnya. Jadi, itu yang masih bisa ada di daerah karena ada Balai Pelestari Budaya, tetapi risetnya memang harus di pusat. Nah, itulah yang sebenarnya kami lakukan.

Nah, memang jadi perlu saya sampaikan bahwa remunerasi di BRIN itu paling tinggi, sehingga memang itu menjadi kendala tersendiri bagi mereka. Kalau mereka pindah ke BRIDA, otomatis mereka akan berubah, meskipun masih bisa sebagai peneliti dan pensiun di usia 70. Tapi, kalau kembali ke K/L mereka tidak bisa sebagai peneliti dan tidak bisa pensiun di usia 70. Jadi, ini

memang ada masalah personal. Jadi, nah itu yang perlu saya sampaikan sebenarnya bahwa kondisinya seperti itu.

Tetapi kami tidak bisa lagi menunggu terlalu lama. Kalau tidak, kita kami hanya akan menunggu teman-teman ini pensiun dengan tetap memberi gaji padahal dia ada di Kendari hanya berdua misalnya, ada yang banyak seperti itu. Kalau di Makassar cukup besar itu ada 300 orang dan kemarin sudah saya datangi satu persatu bahwa ini memang sudah waktunya kita memilih. Tidak mungkin negara ini harus menanggung gaji kalian yang besar tanpa kalian pindah ke pusat, di mana tenaga kalian sebenarnya dibutuhkan untuk melakukan hal yang jauh lebih besar. Jadi, kalau WFA terus ya sama saja bekerja dari rumah sebenarnya, sejujurnya saja. Jadi, itu yang sebenarnya terjadi terkait dengan *home base*.

Kemudian, mengapa kita semua harus melakukan seperti itu? Karena di dalam dunia riset itu tidak ada yang namanya sentralisasi ataupun desentralisasi, karena kami bukan aktivitas teritorial seperti polisi atau apa Kementerian Dalam Negeri. Dalam riset yang ada itu adalah pembentukan *center of excellence*. Jadi, kami memiliki *center of excellence* di Lombok Utara, ada khusus untuk biota perairan laut. Jadi yang teripang yang begitu itu semua di Lombok Utara. Jadi, orang Aceh pun kalau mau belajar itu dia harus ke Lombok Utara. Di situlah banyak doktor-doktor yang memang terkait dengan itu mereka bersama-sama melakukan itu. Semua *problem* dari daerah yang terkait biota laut, budidaya biota laut itu dilakukan di mereka.

Kami ada *center of excellence* di Lampung yang di dekat pintu keluar tol untuk mineral, hilirisasi mineral. Kami ada *center of excellence* di Gunung Kidul untuk teknologi proses pangan di Wonosari. Jadi, semua nasional ya hanya di situ. Riset tidak bisa dipecah *center of excellence*-nya dipecah di mana-mana, karena nanti terjadi seperti setengah abad ini, akhirnya semua kecil-kecil tidak sanggup untuk boro-boro mengembangkan diri, mempertahankan diri saja sudah tidak sanggup. Karena periset itu tidak bisa kalau dia tidak ada *critical mass* komunitasnya. Jadi, itu sebenarnya yang kami lakukan. Jadi bukan berarti semua di Jabodetabek, tidak. Itu tidak sama sekali tidak, ada yang di Kebumen ada khusus untuk bebatuan, misalnya. Jadi seperti itu, memang yang besar ada di Cibinong untuk *life science*, dan *engineering* untuk di Serpong, dan ICT, TIK kalau untuk di Bandung. Jadi, kurang lebih seperti itu.

Nah, sehingga *homebase* ini memang tidak bisa kita biarkan terus mereka berpecahan di mana-mana seperti masa sebelumnya dengan memang zona nyamannya memang terlanjur nyaman, barangkali jadi saya bisa memahami karena itu saya datangi satu persatu. Kemarin saya baru dari Ambon juga misalnya.

Nah, kemudian terkait dengan tumpang tindih kewenangan dengan Kemendiktisaintek. Jadi, sejujurnya tadi seperti disampaikan harus ada hak jawab dan sebagainya, *insyaallah* kami akan melakukan hak jawab, tetapi perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada tumpang tindih. Saya sangat hormat dengan Pak Mendiktisaintek, kami sudah kenal secara personal lama

sekali sejak belasan tahun yang lalu. Tetapi memang terkait dengan BRIN beliau mungkin memiliki pemikiran yang berbeda.

Tetapi yang saya sampaikan, saya sebagai kepala lembaga dan beliau sebagai kepala lembaga kita harus berdiri bukan atas opini personal. Jadi negara ini sudah mengamanatkan seperti disampaikan Ibu Pimpinan, bahwa harus ada BRIN dan kita memiliki alasan teknis yang sangat kuat bahwa memang kita harus melakukan ini, sehingga kita bisa memunculkan, memfasilitasi RnD-RnD industri secepat dan sebanyak mungkin. Bukan lembaga pemerintahan yang dibanyakin, tapi RnD industrinya yang harus dibanyakin. Itu yang menjadi kunci.

Nah, kemudian *best practices* di luar negeri itu memang selalu ada kementerian yang ngurus kampus dan ada badan riset. Badan riset itu satu lembaga yang memang dia fokus melakukan riset yang biasanya berskala besar dan membutuhkan periset *full time*, tidak bisa sampingan. Nah, riset di kampus itu tidak akan berkembang kalau tidak ada jangkar, *anker* dari *enabler* ini. Misalnya, ini tidak hanya riset antariksa atau yang begitu, tidak. Kalau kita bicara riset terkait genomik, itu tidak mungkin dilakukan di kampus, tidak mungkin. Riset membuat vaksin, di kampus atau di periset kami, riset bikin vaksin itu cukup 3-5 orang, tapi itu hanya sampai kandidat vaksin cukup di lab biasa saja. Tetapi untuk membawa itu menjadi vaksin beneran itu membutuhkan *effort* yang luar biasa dan industri farmasi kita tidak sanggup melakukan itu.

Ini contohnya sudah kami alami pada saat pandemi, tidak mungkin. Karena apa? Untuk masuk ke industri yang vaksin ini dia perlu melalui tahapan yang sangat *rigid*, ada regulasi globalnya yang di kalau di Indonesia dipegang BPOM dan kita harus mengikuti itu. Karena ini masalah keamanan memasukkan sesuatu ke tubuh manusia. Jadi, memang harus kita ikuti, suka tidak suka, prosesnya ini memang panjang. Jadi harus ada uji praklinis tahap satu dengan mencit, apalagi kalau waktu covid itu infeksius berarti perlu BSL, (*Lab Bio Safety*) Level 3 untuk mencit. Habis itu praklinis tahap 2 itu perlu dengan makaka. Mencit itu untuk memastikan apa efektivitasnya bahwa dia efektif, untuk keselamatan kalau dimasukkan di tubuh manusia itu perlu makaka, karena makaka itu serupa dengan tubuh manusia. Itu perlu *animal* BSL 3 yang untuk makaka. Yang satu kandangnya saja kalau yang infeksius itu seharga rumah KPR saya. Itu kita memiliki 70 saat ini kandang, itu hampir 0,5 triliun yang ada di Cibinong, itu tidak ada farmasi kita yang akan sanggup. Farmasi luar negeri pun tidak akan sanggup melakukan itu.

Itu yang kami buka sekarang farmasi bisa bergantian memanfaatkan itu berbasis pinjam pakai, nanti kita minta lisensinya kalau terjual. Di situlah kehadiran negara untuk memastikan bahwa farmasi kita bisa masuk dan itu tidak mungkin kalau tidak dikelola di BRIN. LIPI dulu hanya 2 triliun, kalau saya disuruh membiayai 0,5 triliun pada saat pandemi itu saya Kepala LIPI, saya sampaikan tidak mungkin, saya enggak bayar gaji karyawan. Ini kalau bikin *animal* BSL 3 makaka 0,5 triliun. Belum yang lain, belum cGMP-nya untuk sampai mendapatkan izin edar dan seterusnya.

Nah, kita tidak ingin negara ini sebesar ini pada saat terjadi pandemi seperti kemarin kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah salah satu bentuk dan yang menjadi komitmen yang saya pahami dari Pak Prabowo saat ini pun terkait Hankam negara ini. Jadi, Hankam baik dari sisi pangan maupun dari sisi kesehatan dan seterusnya. Jadi, ini yang apa kenapa tetap perlu ada lembaga seperti BRIN, tidak mungkin kampus melakukan seperti itu. Jadi, ada juga yang pengembangan vareitas padi misalnya yang berbasis genetik itu juga tidak mungkin di kampus. Karena pengumpulan data sumber daya genetik nasional itu sangat mahal. Kalau kita sudah mengumpulkan itu baru kampus bisa melakukan risetnya mengambil data yang ada di kami.

Demikian juga dengan kelautan. Mengapa kami ada pembelian kapal riset, armada kapal riset. Setelah digabung di BRIN, tadinya kapal riset itu yang memiliki hanya posisi trosal di angkatan laut, kebetulan beliau mantan Jenderal Laksamana Angkatan Laut. Di LIPI dan di BPT, kita tidak pernah mengizinkan orang lain pakai kapal kita, padahal kapal kita akhirnya *ngedok* juga di Muara Karang sampai rusak. Itu yang tidak kami tidak ingin terjadi lagi. Sehingga sekarang kami jadikan satu. Begitu jadi BRIN, kita memiliki armada kapal riset dan itu yang kita buka kita sediakan hari layarnya memakai imbal hasil dana abadi penelitian dari LPDP. Memastikan 110 fakultas kelautan kita itu pernah ke laut. Kalau Bapak-Ibu tanya para rektor, fakultas kelautan kita tidak pernah ke laut. Pasti dia hanya di *seagrass*, rumput laut paling banter risetnya. Boroboro masuk ke laut dalam, padahal 60% lautan kita itu laut dalam yang di bawah 200 m. Kemarin 3 bulan yang lalu, kita bisa masuk sampai 7.000 m untuk pertama kalinya. Dan kita menemukan mikroba yang bisa menjadi punya senyawa aktif yang bisa menyembuhkan *cancer* usus, dan seterusnya berpotensi menyembuhkan, itu misalnya. Jadi, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan setelah ada proses tersebut.

Memang untuk membuat itu bisa terjadi tata kelola harus diubah total. Itu yang membuat teman-teman seolah-olah, "Oh administrasinya jadi ribet karena dulu dia kalau dapat proyek itu di-*cash*-kan". Dan itu yang tidak kami benarkan lagi karena itu tidak sesuai dengan standar akuntansi dan tata kelola. Dan di luar negeri pun tidak ada yang model seperti itu. Karena saya sendiri Diaspora, berbelas tahun di luar dan apa saya tahu persis bagaimana melakukan itu.

Jadi, itu yang kira-kira bisa saya sampaikan terkait dengan masalah yang berseliweran di media khususnya. Nah, tetapi jelas tadi kami akan memakai hak jawab, Bapak. kami akan mencoba, selama ini kami belum memakai itu karena memang Tempo agak, ya mohon maaf saya nggak boleh menyebut nama, tapi itu memang tidak saya ladeni.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Mohon maaf Bapak, karena ini sudah 18.30 saya tambah 15 menit. Tapi Bapak singkat padat saja, ya.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Baik.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Supaya nanti bisa dilanjutkan ini. Saya tambah dulu Pak, ini harus saya pukul dulu Pak, 15 menit lagi.

(RAPAT: SETUJU)

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Ya, jadi saya pastikan saya akan ke Pak Satrio. Pak Satrio adalah senior saya ya, keluarga besar saya dan itu sohib saya yang paling sohib bersama-sama Pak Sangkot dan yang lain-lain. Ya, saya tahu semua ininya, tapi saya akan lakukan sebagai junior.

Yang kedua. Jadi masalah ditulis tidak diundang *retreat* dan sebagainya sebenarnya yang tidak diundang *retreat* itu tidak hanya kami, Bapak. Semua yang diundang *retreat* itu adalah yang dilantik pada saat tanggal 20 Oktober dan seterusnya. Tapi yang masih dalam masa jabatan seperti kami, seperti BNPB, BNN, BNPT, BSSN, itu tidak perlu. Malah aneh, kalau karena seolah-olah kami direset nanti 5 tahunnya direset, kurang lebih seperti itu. Jadi, tapi kan itu tidak perlu saya jawab ya Bapak ya ke media.

Kemudian, nah terkait tadi disampaikan Bu Ledia. Jadi, terima kasih Ibu, saya ingat betul Ibu berjuang keras untuk kami bersama Bu Marlinda. Dan kami saat ini dari sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, ada 25 PP, 2 Perpres yang diamanatkan dan sudah diputuskan sejak Pak Jokowi bahwa cukup dibuat menjadi dua PP, yaitu PP Renduk Pemajuan IPTEK, Rencana Induk Pemajuan IPTEK dan PP Penyelenggaraan IPTEK. Kedua RPP ini kami sudah selesaikan dan tentu kami melakukannya juga bersama-sama waktu itu dengan Kemendikbudristek. Jadi, seperti itu kurang lebih.

RPP Bu, karena memang amanatnya PP.

Belum Bu, tapi proses sampai harmonisasi sudah selesai. Jadi mohon nanti dukungannya supaya bisa segera diundangkan ya. Jadi sudah tuntas, Ibu. *Inshaallah* kalau itu, memang kami semua berkejaran dengan RPJMN gitu, dengan Bappenas juga, jadi kurang lebih seperti itu.

Kemudian, untuk...

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Pak, mohon izin Bapak. Tadi saya sudah menyampaikan tidak perlu dijawab satu-satu.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Tidak perlu semua ya Bu, ya.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Bapak, semua jawaban Bapak ini mohon nanti secara tertulis.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Akan kami buat.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Dibuat dan diserahkan kepada Komisi X.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Siap.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Iya nanti jam 18.00 juga nggak selesai Pak.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Iya baik.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Baik, begitu ya Bapak ya. Poin-poin penting soal *homebase* soal rencana apa namanya jalan, peta jalan kan sudah dijawab semua, *nggih*.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Ya.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Dan juga beberapa hal prinsip saya kira sudah terjawab, Pak. Hanya nanti jawaban tertulis secara keseluruhan mohon dikirimkan kepada kami.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Sebenarnya artefak, tapi ya nggak apa-apa nanti sampaikan khusus, ya. Terima kasih.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Ya. Terima kasih, Pak Laksono.

Kami minta Ibu Amalia lebih singkat ya Bu, ya.

Iya, terima kasih.

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Terima kasih, Bu Pimpinan.

Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu Pimpinan dan anggota yang telah menyampaikan pertanyaan kepada kami.

Mohon izin Bu, kami singkat saja dan secara detail akan kami sampaikan secara tertulis.

Pertama, mengenai kemiskinan, Bu. Kami tentunya dalam menghitung kemiskinan ada dua, kemiskinan makro dan mikro. Makro adalah angka kemiskinan dan mikro adalah untuk data pensasaran. Bagaimana nanti kami menghitung secara makro dan mikro tentunya ada standar yang kami ikuti dan akan kami jelaskan nanti dalam jawaban kami secara tertulis, Bapak-Ibu.

Kemudian yang kedua, adalah mengenai modernisasi proses bisnis. Kami melakukan dengan *computer assisted personal interviewing*, kami juga melakukan *computer assisted web interviewing*, proses modernisasi ada. Memang kalau tadi Bapak pernah menerima SMS, mungkin itu hanya salah satu saja Pak dari sumber, tetapi kami tidak menggunakan itu sebagai satu-satunya. Masih ada metodologi lain yang kami gunakan untuk memastikan data yang kami kumpulkan tepat.

Kemudian untuk RUU Statistik Bapak dan Ibu, kami mohon dukungan Bapak dan Ibu anggota Komisi X untuk bisa mendorong dan juga mempercepat proses revisi Undang-Undang Statistik ini, karena kalau kita hitung umurnya Bapak Ibu 1997 dan sekarang sudah mau ke 2027, artinya hampir 30 tahun.

Kemudian untuk mencari data kami sekarang sudah siapkan data dalam web. Jadi website www.bps.go.id ini sudah ada data-data dan bisa diunduh. *Excel*-nya pun juga sudah kami sediakan, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi mengetik ulang, *entry* ulang karena *excel*-nya sudah ada. Dan apabila nanti masih ada kesulitan, kami setiap kantor BPS baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota sudah ada pusat pelayanan statistik terpadu yang siap melayani apabila ada pertanyaan terkait dengan data ataupun untuk memperoleh data.

Kemudian untuk sensus pertanian, Bapak dan Ibu. Tadi ada pertanyaan mengenai sensus pertanian ini memang data yang terlengkap mengenai pertanian, termasuk ada data subsidi di situ, siapa saja yang memperoleh subsidi, ini sebagai rekapitulasi Pak. Ini adalah sebaran usaha pertanian yang

menerima subsidi pupuk, ini hasil salah satu hasil dari sensus pertanian. Dari sensus pertanian ini juga kami bisa menghasilkan data di mana lokasi petani tersebut termasuk modernisasi pertanian yang sudah dilakukan, jenis pupuk yang digunakan, dan lain-lain.

Terakhir, kami juga ingin memperoleh dukungan dari Bapak-Ibu semua, karena di tahun 2026 kami akan melakukan sensus ekonomi. Ini adalah kegiatan statistik yang besar yang mencakup pendataan aktivitas ekonomi di seluruh Indonesia. Dan kami mohon dukungan dari Bapak-Ibu dan kami siap untuk Bapak Ibu apabila nanti untuk mensosialisasikan sensus ekonomi supaya membangun *awareness* kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang pentingnya sensus ekonomi Indonesia.

Terakhir,

*Berlayar ke Bali lalu berlabuh,
Sampai di Bali membeli batik
Terima kasih untuk Komisi X,
Telah menerima BPS dengan sangat baik.*

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Baik. Terima kasih Bapak-Ibu semua.

Kita masih punya waktu 10 menit. Kami akan mencoba menyampaikan kepada Bapak-Ibu mengenai catatan ataupun kesimpulan di dalam Raker ini. Dan mungkin bisa ditayangkan terlebih dahulu, mungkin ada yang harus disempurnakan atau masih ada beberapa yang belum masuk. Mari kita lihat, tanpa perlu harus saya bacakan tentang pendahuluannya, langsung catatannya. Bapak Ibu dari BRIN dan dari BPS juga mohon ikut bisa mengoreksi jika ada sesuatu yang belum benar dan juga kepada Bapak Ibu semua anggota DPR RI Komisi X.

Kita lihat,

Komisi X DPR RI telah memperoleh penjelasan gambaran umum dan arah kebijakan BRIN dan BPS periode 2024-2029. Terhadap hal tersebut, Komisi X DPR RI memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Komisi X mendukung program Arah Kebijakan BRIN 2025-2029 dan Arah Kebijakan 2025, Kebalik ya.

Kebijakan BPS 2025-2029 yang telah dicanangkan.
Ada koreksi, BPS-nya maju.

Saya lanjut.

2. Komisi X DPR RI mendorong BRIN dan BPS meningkatkan kualitas riset, inovasi dan data statistik yang digunakan sebagai basis perencanaan,

monitoring, dan evaluasi bagi pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan kebijakan strategis nasional.

Ada koreksi, Bapak, Ibu?

BRIN?

Bapak? Silakan, Prof.

F-P. NASDEM (Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.):

Ya mungkin kan ini untuk ya ini ya kalimatnya. Kalau riset, inovasi kan mungkin lebih cenderung ke BRIN ya, bukan ke BPS.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Oh baik, ini sebaiknya memang dipisah, ya.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Iya. Betul Bu.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Ada dua hal yang berbeda memang. Iya, silakan dipisah dulu. Jadi, Komisi X DPR RI mendorong BRIN untuk.

Kan nggak bisa dua-duanya jadi satu, nanti yang berikutnya baru bicara BPS.

Mendorong BRIN meningkatkan kualitas riset, inovasi, apalagi ya, kata-katanya apa, Pak? Silakan BRIN dibenahi, Pak.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Bila diperkenankan itu kualitas riset dan inovasi.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Oke meningkatkan kualitas riset dan inovasi, BPS-nya dihilangin dulu, data statistik dihilangin dulu.

Apa itu? Kualitas riset dan inovasi.

Ya. Inovasi. Kualitas riset, inovasi, dan inovasi.

Inovasi dan inovasi.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Yang lintas itu tidak perlu.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Oh, ada lintas toh?

Oh, itu tadi muncul sendiri Pak.

Iya. Dan-nya hilang, dan setelah inovasi hilang.

Yang digunakan sebagai basis perencanaan, monitoring nggak, ya?

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Bu Ketua, izin. Mau nanya berkaitan dengan ini ke Pak Laksono.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Iya silakan, Mbak.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Pak, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 itu kan ada terminologi litbang jirap ya, penelitian, pengembang, pengkajian, dan penerapan. Apakah ini kemudian akan bisa kita masukkan di sini memastikan bahwa penerapannya, bukan cuma sekedar invensi dan inovasinya tapi penerapannya kan juga diperlukan. Mungkin kata-katanya bisa dibantu dengan definisi.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Sesuai dengan undang-undang mestinya bunyinya.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Ya, dilengkapi Bu.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Iya, untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Betul, iya.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Begitu ya, Pak.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Iya.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Hayo, *opo*.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Risetnya digantikan dengan penelitian.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Iya, untuk menjalankan peneliti, untuk meningkatkan hilang ya, untuk.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Untuk meningkatkan.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Meningkatkan.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Kualitas penelitian.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Kualitas penelitian. Betul untuk meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Pengkajian.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang digunakan sebagai basis.

Basis apa tadi?

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Perencanaan.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Betul ya Pak, ya?

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Ya.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Perencanaan dan evaluasi bagi pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan.

Kata-katanya banyak dan-nya, ya? Kalau koma nggak apa-apa. Sebagai basis perencanaan. Kalau hanya satu nggak pakai koma.

Dan evaluasi bagi pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan serta pengambilan. Eh, perumusan kebijakan serta pengambilan kebijakan?

Dalam perumusan kebijakan dan dalam perumusan dan pengambilan.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Iya. Perumusan dan pengambilan.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Serta pengambilan. Yes. Kebijakan dalam perencanaan, dalam perencanaan strategi nasional.

Perencanaannya nggak ada, ya?
Pengambilan, dalam pengambilan. Oh sudah di situ, oke.

Sudah di, sudah-sudah. Begitu, Pak?
Baik. Nomor tiga ini tentang BPS yang tadi dijadikan satu. Bagaimana?

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Kami mengusulkan begini Ibu: sebagai penyedia data utama yang digunakan.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Oh, Ibu ya? Aku lihat di sana. Baik Ibu.

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Iya sebagai penyedia data utama yang, sebagai penyedia data, sebagai penyedia indikator utama pembangunan, sebagai penyedia indikator utama pembangunan, itu sudah ada tinggal dihapus saja sudah ada itu.

Sebagai penyedia data dan indikator utama pembangunan, sebagai penyedia data dan indikator utama.

Komisi X DPR RI mendorong BPS untuk menyajikan data yang berkualitas, yang berkualitas jadi presisi terkini dan terintegrasi bisa dihapus Bu. Ya, dan menjadi referensi bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan. Begitu, Bu.

Bagi kementerian/lembaga itu sudah ada, tinggal dihapus. Dan pemerintahan daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis, berbasis data ya. Dalam perumusan kebijakan berbasis data, udah titik Bu.

Kebijakan berbasis data, titik. Sisanya bisa dihapus.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Bu Ketua, boleh izin. Untuk konsistensi saja, jadi Komisi X DPR RI-nya di kedepankan.

Komisi X DPR RI mendorong BPS, sebagai penyedia data dan indikator utama pembangunan, untuk menyajikan. Jadi anak kalimatnya adalah sebagai penyedia data dan seterusnya.

F-P. NASDEM (Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.):

Lebih dipertegas lagi Bu, barangkali. Ibu Kepala BPS.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Silakan Pak.

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Ya.

F-P. NASDEM (Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.):

Data itu kan masih mentah ya, belum bisa dijadikan rujukan. Langsung aja berarti, informasi bagaimana.

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Penyedia data statistik kali, ya? Data statistik Pak. Jadi, jadi kalau sudah statistik sudah diolah, Pak.

F-P. NASDEM (Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.):

Sudah diolah. Oke boleh.

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Menyajikan data statistik, data statistik yang berkualitas.

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Data statistik.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Iya.

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Untuk menyajikan data statistik yang berkualitas.

Di bawah, ya.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Berikutnya yang nomor empat.

Coba, Ibu.

4. Komisi X DPR RI mendukung BPS untuk membangun sistem statistik nasional yang andal efektif dan efisien serta selaras dengan era revolusi data di semua bidang pembangunan, melalui penyusunan RUU Tentang Statistik.

RUU Tentang Statisk ini perubahan atau baru ya?

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Revisi Bu.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Oh, penyusunan revisi. Revisi undang-undang, judulnya apa dulu, Bu?

Boleh-boleh gini?

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Tentang statistik.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Melalui penyusunan revisi undang-undang nomor berapa?

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Nomor 16 Tahun 1997.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Tentangnya tentang statistik?

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Ya, tentang statistik.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Melalui penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik betul. Titik betul.

Ya, terkait hal tersebut Komisi X DPR RI mendukung upaya penyusunan, itu diganti lagi revisi.

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Melalui penyelesaian Bu, mungkin.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Oh, bagaimana, Bu?

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Kalau boleh usul bukan melalui penyusunan, tetapi melalui penyelesaian.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Bukan.

Berarti penyusunannya sudah ada RUU-nya itu sudah ada?

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Itu inisiatif DPR Ibu, mohon izin.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Oh, nah ini. Kemarin sudah di komisi terkait, ya? Baleg, sudah di Baleg? Berarti judulnya jadi bagaimana?

F-P. NASDEM (Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.):

Iya Bu, izin.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Iya silakan, Pak.

F-P. NASDEM (Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.):

Jadi, undang-undang kan sudah ada, kan kita mau, mau kita perbaiki. Ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 itu sudah.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Betul. Kemudian kan harus revisi itu harus ada drafnya.

F-P. NASDEM (Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.):

Iya betul, makanya kan rancangan, RUU perubahan kan begitu.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Revisi Undang-Undang tentang, sebentar *kalimate piye iki mau?*

Oh nomor empat baca dulu, Komisi X DPR RI.

Sebentar Mbak nomor empat, Mbak.

Nomor *papat*, Komisi X DPR RI mendukung BPS untuk membangun...

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Kalau boleh Ibu, mohon izin.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Melalui, bukan penyusunan.

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Andal efektif dan efisien, titik.

Pak Bu, Komisi X DPR RI mendukung BPS untuk membangun sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Terus.

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Untuk itu, Komisi X.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Dilanjut Pak, iya.

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Untuk itu Komisi X DPR RI akan mendorong penyelesaian revisi undang-undang.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Pembahasan.

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Iya, iya. Akan mendorong penyelesaian pembahasan dan penyelesaian.

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Lewat Baleg, lewat Baleg dulu.

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Iya.

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Lewat Baleg langsung kan.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Iya pembahasan dan penyelesaian.

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Pembahasan dan penyelesaian.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Revisi.

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Ya, sudah gitu aja.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Ibu Ketua, ingin mengkonfirmasi ini kan belum jadi inisiatif DPR kan, Bu?

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Sudah inisiatif DPR, sudah.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Sudah, ya? Sudah jadi inisiatif DPR.

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Periode sebelumnya.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Periode sebelumnya, berarti yang kita lakukan adalah harus mendorong agar jadi *carry over*.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Oh, baik.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Sebab kalau kita tidak menyatakan untuk dibahas jadi *carry over*, nanti kayak Pertamina, mulai dari nol lagi.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Oh, itu. Oke berarti kalimatnya untuk itu Komisi X akan mendorong *carry over*, *opo* jadinya, bahasa Indonesiane *opo*.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Belum inisiatif DPR.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Oh, belum dibahas kok.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Oh, kalau baru penyusunan, makanya tadi saya perlu konfirmasi.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Iya.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Kalau baru penyusunan belum jadi inisiatif DPR baru dibahas di Baleg, kan? Seingat saya memang belum jadi inisiatif DPR. Kalau belum jadi inisiatif DPR, maka tidak bisa *carry over* berarti dia baru penyusunan. Jadi bukan penyelesaian, bukan pembahasan, kalimatnya adalah penyusunan. Jadi, mendorong percepatan penyusunan undang, penyusunan rancangan undang-undang perubahan atas, rancangan undang-undang, ya RUU perubahan atas, revisinya diganti Undang-Undang Nomor 16 tentang Statistik, untuk masuk dalam Prolegnas prioritas. Ini harus dijadikan, untuk dapat menjadi, untuk masuk daftar dalam daftar Prolegnas prioritas, dalam daftar Prolegnas prioritas 2025. Kalau kita mau cepet.

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Izin, tadi kita rapat di Baleg, sudah memasukkan ini sebagai bagian dari Prolegnas jangka menengah. Kalau untuk yang prioritas itu ada dua, Sisdiknas dan Kepemudaan.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Nggak apa-apa Bu, kita kan cuman mau bilang usul ini kan, tapi rapatnya sudah di situ. Nggak ada masalah, nanti yang paling penting kita mendorong supaya dia cepat. Bahwa nanti ternyata misalnya kata Baleg, "yaudah diambil Baleg", misalnya. Tapi kita intinya kita sudah menyebutkan dia prioritas supaya nanti ada proses yang lebih cepat.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Iya, jadi memang kita hanya dipersilakan untuk mengisi dua, yaitu Sisdiknas dan Kepemudaan, Pemuda. Nah, karena ini hal baru tetapi kita sampaikan setelah rapat di Baleg, saya kira tidak ada persoalan, Bu. Persoalan nanti kemudian masuknya di *long list* yang jangka panjang 5 tahun, nah kita berupaya nanti kalau kita bisa membahas cepat ya 2025, kalau nggak ya berarti 2026 atau di Baleg sendiri yang akan melakukan pembahasan. Tapi ini saya kira untuk ngunci aja Bu, nggak apa-apa, Bu. Karena rapat ini dilakukan setelah tadi pembahasan Prolegnas setelah, iya. Kalau nanti selesai boleh tiga. Kalau selesai boleh.

Asal masuk *long list*, maka ini pasti harus masuk *long list* dulu, jangka panjang dulu.

Iya, yang tadi mesti 2025, masuk *long list* itu artinya masuk di dalam daftar jangka panjang 5 tahun.

Iya, sudah masuk, kan? Iya.

Baik, lanjut nomor 5.

F-P. NASDEM (Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.):

Izin Bu, masih nomor 4 ya. Jadi mungkin ditambahin kalau setuju ini, membangun sistem statistik nasional yang menyajikan *big data* gitu ya, yang andal, efektif, dan efisien.

Artinya *big data* ini kita datanya terpusat, besar, dan bisa diakses. Kan seperti yang tadi yang diminta tadi, mudah, bisa diakses begitu. Kalau kemungkinan bisa ditambahkan.

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Izin, karena ini kan tidak hanya data ya di statistik ini, jadi ada sistem yang memang harus diperbaiki juga. Jadi data adalah bagian dari sistem menurut saya, iya.

KEPALA BPS RI (AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI):

Iya, jadi *big data*. Mohon izin Bapak Ibu, *big data* itu adalah sebagai salah satu sumber data untuk menghasilkan data statistik. Jadi kalau boleh seperti tadi itu sudah mencakup semua termasuk *big data* di dalamnya. Jadi tidak perlu dieksplisitkan *big data*-nya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Inggih. Terima kasih.

5. Komisi X DPR RI menerima seluruh paparan yang disampaikan BRIN dan BPS, materi paparan akan menjadi bahan bagi Komisi X DPR RI untuk mengkaji kebijakan dan regulasi bidang riset dan inovasi serta statistik yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Boleh.

6. Saran dan masukan DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat hari ini menjadi masukan untuk perbaikan kebijakan riset, inovasi, dan, menjadi perbaikan kebijakan BPS dan BRIN,

Gitu ya?

7. Seluruh pertanyaan dan pandangan Anggota Komisi X yang belum mendapatkan tanggapan agar dijawab secara tertulis.

Mohon izin Bapak Laksana, Bapak, Ibu Amalia kami minta tanggal 19 November secara tertulis, mohon untuk bisa nanti diserahkan ke Sekretariat Komisi X. Kalau tidak biasanya kami tagih janji, Pak. Kami ini ingat kalau soal tanggal Pak, ya.

F-P. DEMOKRAT (Drs. SABAM SINAGA, M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Inggih.

F-P. DEMOKRAT (Drs. SABAM SINAGA, M.M.):

Boleh sekiranya ditambahkan, kalau berkenan. Berkait dengan gonjangan terhadap BRIN, sekiranya dimungkinkan Komisi X menugaskan BRIN untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait, ya.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Kalimatnya bagaimana, Pak? Coba kita masukkan.

Bapak setuju itu dimasukkan?

Iya, berarti nomor.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Nah, yang ini boleh Bu, di sini nggak apa-apa.

Di situ, berarti Komisi X DPR RI.

Nomor 6 saja, nomor 6 Mbak, dibalik Mbak. Nomor 6, 7 itu digantikan nomor 6. *Sik nomor enem nomor pitu, sik nomor pitu nomor wolu.*

Hah, sok sok ora ngerti lho pitu wolu ki piro.

Dimaafkan ya. Mendorong, mendorong BRIN.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Mendorong Kepala BRIN.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Kepala BRIN RI.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Kayaknya nggak pakai RI deh, Bu.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Untuk melakukan koordinasi dan komunikasi, komunikasi *sik ngono yo, ya wis* nggak apa-apa.

Terkait dengan, dengan apa Pak?

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Komunikasi dengan kementerian/lembaga terkait.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Oke dengan K/L terkait, K/L.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Komunikasi terkait dengan K/L terkait, nanti terkait semua itu.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Komunikasi dengan, terkait *ngarep* hilang. Komunikasi dengan K/L yang.

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Terkait aja nggak usah pakai yang.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Komunikasi dengan K/L terkait *opo*, yang terkait dengan riset.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Dengan.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Nah, gitu aja.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Pada dasarnya dengan tata kelola sih, karena nanti tata kelolanya mau riset dasar apa mau riset lanjutan, terus terkait dengan apa, tupoksinya, dan lain sebagainya, terkait dengan itu.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Tidak hanya koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi. Kalau nggak sinkron-sinkron enggak *mlaku*.

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Koordinasi dulu baru komunikasi.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Iya, oh *yo*. Berarti apa tambahannya, koordinasi, komunikasi, *diwalik yo*, komunikasi untuk bisa, komunikasi, koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi.

Apa ini Pak yang betul? Tapi tidak hanya koordinasi memang harus ada harmonisasi. Ini kan dari pandangan sudut pandang yang begitu banyak, Pak.

Engko lah pak, ora iso, yo. Tambah kolaborasi. Komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi.

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Bu, sebetulnya yang kita bicarakan intinya tadi itu menyangkut tupoksi.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Lha iya.

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Iya itu.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Nah, itu tata kelola sudah. Tupoksi kan terkaitan dengan tata kelola, begitu ya, Pak?

F-P. NASDEM (Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.):

Bu Ketua.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Tambahono, apa tadi. Sasi-sasi tadi.

Nggak lah, jangan banyak.

Monggo Prof.

F-P. NASDEM (Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.):

Ini sekalian saja, karena saya kita melihat, kita harus jujur akui bahwa di internal juga ada persoalan ya kan, maka tambahkan saja kalimatnya, Komisi X mendorong Kepala BRIN untuk melakukan konsolidasi internal dan secara eksternal, yang tadi itu tambahkan, ya.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Mohon izin Bu Pimpinan, kalau boleh yang membenahi itu mensinergikan begitu, ya.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Itu satu kalimat itu sudah merangkum semua belum? Bapak Ibu sudah terpuaskan belum dengan kata itu? Kalau belum tetap kita perjelas ini.

Mensinergikan, sinergi, sinergi itu berarti sudah, sinergi itu pasti sudah harmonis, ya?

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Iya.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Sudah sinkron?

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Kalau melalui, setelah melalui itu cukup harmonisasi dan sinkronisasi saja.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Oke, melalui sinkronisasi.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Harmonisasi dan sinkronisasi.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Oh, harmonisasi dan sinkronisasi.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Iya.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Koordinasi dibuang. Kenapa, Pak? Kenapa tidak ada?

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Ya kan otomatis itu pasti.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Terlalui ya. Untuk menyinkronkan harus, oke.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Pasti sudah termasuk.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Iya, kalau sudah harmonis berarti sudah lewat komunikasi.

Baik. Sinkronisasi, harmonisasi dan sinkronisasi begitu Pak?

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Ya. Untuk mensinergikan.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Dengan K/L terkait.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Iya. Untuk mensinergikan tata kelola.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Untuk mensinergikan, bukan untuk membenahi. Mensinergikan, membenahi berarti *rodok ora pener*, gitu ya. Nek mensinergikan tuh hanya karena belum.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Ya, ini penyamaan persepsi sebenarnya, Bu.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Iya, iya. Betul, betul.

KEPALA BRIN (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO):

Iya, iya.

Karena kan nanti ada LPDP, ada kami, Kemenag, Kemendikisaintek, ya.

KETUA RAPAT (MY ESTI WIJAYATI/WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI):

Betul. Baik.

Cukup, Bapak Ibu?

Baik. Nomor 7 sudah, nomor 8 sudah.

Bapak Ibu masih akan ada tanggapan sebelum saya ketuk?

Sudah mau, mau *tak tok* loh ini.

Ya. Baik Bapak Ibu, sudah cukup?

(RAPAT: SETUJU)

Ya itu hasil kesimpulannya dan apa masih ada kata-kata yang mau disampaikan Pak Kepala BRIN dan Ibu Kepala BPS? Cukup? Cukup. Terima kasih.

Bapak-Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala BRIN dan Kepala BPS, kami mengucapkan terima kasih karena kita mampu menyelesaikan Rapat Dengar Pendapat ini dengan cukup efektif dan ada beberapa kesimpulan rapat yang bisa kita gunakan untuk kemudian ditindaklanjuti.

Dengan demikian, selesailah sudah seluruh acara RDP pada hari ini dan dengan seizin Bapak-Ibu Anggota Komisi X DPR RI, Kepala BRIN, dan Kepala BPS serta hadirin sekalian yang kami hormati.

Maka kami tutup Rapat Dengar Pendapat ini disertai ucapan terima kasih kepada seluruh anggota, kepada Bapak-Ibu dari BRIN maupun dari BPS, serta Bapak-Ibu hadirin sekalian dan semoga semuanya ini akan memberikan manfaat sebagai sumbangsih kita terhadap negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Majulah Republik Indonesia, Presiden baru, harapan baru untuk Indonesia merdeka!

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.01 WIB)

**a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

Ttd.

Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si.
NIP.197206221999032001